

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Konseptual

##### 1. Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam

###### a. Dakwah

###### 1) Etimologi

Ditinjau dari sisi bahasa (etimologi), Dakwah secara jelas merupakan sebuah kata dari Bahasa Arab. Dalam Bahasa Arab, kata dakwah terdiri dari susunan huruf *dal*, *'ain*, dan *wawu*. Huruf- huruf ini membentuk kalimat seperti; *daa'a*, *yad'u*, *da'watan*.<sup>1</sup> Makna kalimat tersebut diantaranya; ajakan, meminta, seruan, panggilan, undangan, permohonan atau do'a.<sup>2</sup> Memperhatikan kata-kata tersebut, dapat dipahami bahwa dakwah merupakan sebuah stimulus atau dorongan dari atau keluar diri manusia. Misalnya meyemangati diri sendiri atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu.

###### 2) Terminologi

Para ulama berbeda dalam membuat pengertian secara definitif tentang dakwah, disebabkan konteks zaman dan dinamika social yang mempengaruhinya. Misalnya, Syeikh Ali Mahfudz, yang menjelaskan bahwa dakwah adalah mendorong (memotivasi) umat manusia, Amin Abdul Aziz yang menyatakan bahwa dakwah adalah menyeru manusia, al-Bahy al-Khuli lebih ekstrim memahami dakwah sebagai mengubah situasi kepada

---

<sup>1</sup> Budiantoro, Dakwah di Era Digital, (Komunika, Vol. 11, No. 2, Juli - Desember 2017), h. 264.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 37

yang lebih baik, Abu A'la al-Maududi sebagai tokoh pergerakan Islam mengatakan bahwa dakwah adalah suatu revolusi, Amrullah Achmad dengan kalimat yang lebih lembut seperti dakwah adalah aktualisasi imani (*teologis*).<sup>3</sup> Dimana semuanya sepakat bahwa dakwah ditujukan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam secara doktrinal.

Para pengkaji Islam khususnya yang berkaitan dengan dakwah belakangan ini banyak juga yang mencoba mengurai pengertian dakwah ini. Ada yang mengatakan bahwa dakwah adalah sebuah sistem, proses persuasi atau mempengaruhi. Selain dari itu, dakwah juga dianggap sebagai langkah strategis<sup>4</sup> dan merupakan jalan ideal<sup>5</sup> untuk memanusiaikan manusia. Pengertian secara definitive selalu berkembang sesuai dengan kondisi dan fokus dakwah yang diminati oleh para pelaku dan aktivis dakwah.

Uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa dakwah merupakan proses dari sistem sosial yang melakukan aktivitasnya dalam rangka mencapai kehidupan yang harmonis di dunia sesuai dengan ketentuan Allah SWT., dan Rasul-Nya.

## **b. Landasan Dakwah**

Pengertian diatas dapat diturunkan, bahwa dakwah merupakan bagian integral dari ajaran Islam karena mesti sesuai dengan keentuan Allah SWT, dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dari

---

<sup>3</sup> Abdul Basit, *Dakwah Antar Individu Teori Dan Aplikasi*. (Purwokerto: C.V. Tentrem Karya Nusa, 2017), h. 14.

<sup>4</sup> Muhaemin, *Dakwah Digital Akademisi Dakwah*, (*Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* Volume 11 Nomor 2 (2017), 341.

<sup>5</sup> Ahmad Zulfikar Ali, *Dakwah Kh Moh. Faiz Abdul Razzaq (Studi Dakwah Melalui Seni Kaligrafi)*,

konsep *amar ma'uf* dan *nahi munkar*. Aturan yang mengharuskan manusia melaksanakan perbuatan dalam bentuk perilaku *positif-konstruktif*, disamping juga berupaya menghindari perbuatan dalam bentuk perilaku *negatif-destruktif*.<sup>6</sup>

Landasan tersebut dijelaskan Allah SWT, dalam Q.S. Ali Imran:110;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah SWT. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”*

Dijelaskan pula dalam Q.S. at-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,*

<sup>6</sup> Awaludin Pimay, Metodologi Dakwah Kajian Teoritis dan Khazanah Keilmuan, (Semarang: Rasail, 2006), cet I, h. 12-13

*mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah SWT dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT; Sesungguhnya Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Serta termaktub dalam Q.S. Ali Imran:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”*

Ayat tersebut di atas sekaligus dapat dimaknai bahwa pada satu sisi merupakan perjuangan menegakkan kebenaran, serta adanya usaha mengimplementasikan kebenaran Islam dimaksud, ke dalam kehidupan sosial guna menyelamatkan mereka dan lingkungannya dari kerusakan (*al-fasad*).<sup>7</sup> Selain dari itu, berdasarkan kata-kata yang terdapat di dalam Q.S. Ali Imran: 04 di atas, para ulama sepakat bahwa hukum dakwah merupakan wajib (*fardhu*), namun berbeda apakah dakwah itu *fardhu 'ain*, atau (*fardhu kifayah*). Merujuk kepada Q.S. Ali Imran: 110, tersebut di atas, kewajiban ini kepada seluruh umat Islam dari seluruh bangsa yang ada.<sup>8</sup> Hal ini tentu

<sup>7</sup> Awaludin Pimay, *Op. Cit*, h. 12-13

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 14-15

saja dibebankan kepada umat yang *mukallaf*, yaitu manusia yang telah dikenai beban hukum secara *syar'i*.

Namun demikian, para ulama telah membuat klasifikasi mengenai kewajiban berdakwah. *Pertama*, dakwah hukumnya *fardlu kifayah*. Artinya, apabila di suatu tempat sudah ada para *da'i* yang telah menegakkan dakwah,<sup>9</sup> maka kewajiban dakwah bagi yang lain akan gugur dengan sendirinya. Dalam kondisi yang sedemikian itu, dakwah bagi yang lain menjadi *sunnah mu'akad* dan merupakan amal saleh. *Kedua*, dakwah hukumnya *fardlu 'ain* apabila di suatu tempat atau daerah tertentu tidak ada yang melaksanakan dakwah sama sekali, maka dosanya ditanggung oleh seluruh umat dan beban kewajiban ditanggung oleh semuanya. Dalam kondisi semacam ini, setiap pribadi umat Islam diharuskan berdakwah menurut kadar kemampuannya.

Dengan demikian, dakwah bisa menjadi *fardlu 'ain* apabila di suatu tempat tidak ada seorang pun yang melakukan dakwah<sup>10</sup> dan dakwah bisa menjadi *fardlu kifayah* apabila disuatu tempat sudah ada orang yang melakukan dakwah. Demikian juga, ketika jumlah *da'i* masih sedikit, sementara tingkat kemunkaran sangat tinggi dan kebodohan merajalela, maka dakwah menjadi *wajib 'ain* bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hasanuddin, Hukum Dakwah, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 12

<sup>10</sup> Asep Muhiddin, Dakwah Dalam Perspektif al-Qur'an, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hal. 32-33

<sup>11</sup> Awaludin Pimay. *Op. Cit*, h. 16-17

### c. Elemen Dakwah

#### 1) Da'i

Da'i adalah agen sosialisasi nilai-nilai Islam.<sup>12</sup> Da'i (Subjek Dakwah) Da'i adalah orang yang mengajak orang lain baik secara langsung, melalui lisan, tulisan atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam atau menyebar luaskan ajaran Islam, melakukan upaya perubahan kearah kondisi yang lebih baik menurut ajaran Islam.<sup>13</sup> sebagai manusia yang memiliki dimensi individual dan dimensi sosial, maka da'i dapat berupa perorangan juga dapat berupa lembaga.

#### 2) Mad'u (objek dakwah)

Mad 'u atau Sasaran Dakwah Manusia sebagai sasaran dakwah tidak lepas dari budaya kehidupannya dan harus mempertimbangkan dalam pelaksanaan dakwah. Karena itu seorang da'i harus mampu menyikapi segala situasi ini yang direpresentasikan al-Qur'an sebagai *lisanul qaum*; sebuah media yang tepat dan mengayomi untuk menyampaikan materi dakwah.<sup>14</sup> Sedangkan Jamaludin Kafie menjelaskan bahwa Mad'u adalah seluruh manusia sebagai makhluk Allah SWT yang dibebani menjalankan agama Islam dan diberi kebebasan untuk berikhtiar, kehendak dan

---

<sup>12</sup> Muhaemin. Dakwah Digital Akademisi Dakwah, Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies Volume 11 Nomor 2 (2017), h. 344.

<sup>13</sup> Samsu dan Mansur, *Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Kampus Unit Pengkajian Mahasiswa Islam (LDK-UPMI) IAIN Kendari*. Al-Munzir Vol. 12. No. 1 Mei 2019), h. 140

<sup>14</sup> Zainal Pikri (Ed). et.al. INTERNATIONAL SEMINAR “*Dakwah, Local Wisdom and Transnational Islam*”, UIN Antasari Banjarmasin, 2018), h. 93

bertanggungjawab atas perbuatan sesuai dengan pilihannya, mulai dari individu, keluarga, kelompok, golongan, kaum, massa, dan umat manusia seluruhnya.<sup>15</sup>

### 3) Materi atau pesan dakwah

Materia atau pesan dakwah adalah isi pesan yang disampaikan da'i kepada mad'u.<sup>16</sup> Sebuah pesan dakwah dapat bersifat verbal dan nonverbal. Pesan yang bersifat verbal dapat disebut sebagai isi pesan atau materi (*maddah*) dakwah.<sup>17</sup> *Maddah* dapat juga dipahami sebagai pesan-pesan, materi atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh da'i kepada mad'u, yaitu keseluruhan ajaran Islam, yang ada di dalam *Kitabullah* maupun Sunah Rasul-Nya.<sup>18</sup> Materi dakwah yang dimaksudkan adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan da'i kepada manusia yang bersumber dari al Qur'an dan al-Hadis.<sup>19</sup> Selain dari itu, Materi dakwah juga dimaknai sebagai ajaran-ajaran Islam yang termaktub dalam kitab-kitab mu'tabar yang menyatukan tiga komponen ilmu utama yang harus dimiliki manusia dalam posisinya sebagai hamba, yaitu ilmu tauhid yang membahas masalah teologis, ilmu fiqh yang membahas masalah tata cara ibadah dan ilmu tasawuf yang mengurus masalah pembersihan hati dari sifat-sifat tercela

---

<sup>15</sup> Samsu dan Mansur, *Op. Cit.* h. 131

<sup>16</sup> Eva Maghfiroh, *Komunikasi Dakwah; Dakwah Interaktif melalui Media Komunikasi*, (Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, ), h. 38.

<sup>17</sup> Eva Maghfiroh, *Komunikasi Dakwah; Dakwah Interaktif melalui Media Komunikasi*, (Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, ), h. 38.

<sup>18</sup> Samsu dan Mansur, *Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Kampus Unit Pengkajian Mahasiswa Islam (LDK-UPMI) IAIN Kendari*, (al-Munzir Vol. 12. No. 1 Mei 2019), h. 140.

<sup>19</sup> Akhmad Sukardi, *Metode Dakwah Dalam Mengatasi Problematika Remaja*, (Al-Munzir Vol. 9, No. 1, Mei 2016), h. 22.

dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji.<sup>20</sup> Istilah lainnya dalam agama Islam dalam konteks dakwah pesan disebut dengan *maudu'* (pesan Islam), yaitu materi atau segala sesuatu yang harus disampaikan oleh da'i (subjek dakwah) kepada mad'u (objek dakwah) yaitu keseluruhan ajaran Islam, yang ada didalam *Kitabullah* dan sunnah Rasulnya, atau yang disebut juga dengan *al-Haq* (kebenaran hakiki) yaitu al-Islam yang bersumber dari al-Qur'an.<sup>21</sup>

#### 4) Metode

Dalam Bahasa Arab, metode lebih tepat disebut dengan *Thariqah* dan *Uslub* adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah, agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien.<sup>22</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa *Uslub* atau Metode dakwah adalah cara yang dilakukan seorang da'i untuk menyampaikan materi dakwahnya. Seorang da'i harus memiliki kepribadian yang menjadi representasi dari materi dakwahnya selain itu juga seorang da'i seyogyanya telah mengamalkan materi tersebut. inilah yang dinamakan dengan dakwah *bil hal*, yaitu dakwah melalui tindakan nyata.<sup>23</sup>

#### 5) Media (*Washilah*)

Adapun yang dimaksud dengan *Wasilah* dalam dakwah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u

---

<sup>20</sup> Agus Riwanda & Makherus Sholeh, *Preaching Through Social Media*, (Banjarmasin, International Seminar on 'Dakwah, Local Wisdom and Transnational Islam', 2018), h. 93.

<sup>21</sup> Eva Maghfiroh, *Komunikasi Dakwah; Dakwah Interaktif melalui Media Komunikasi*, (Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, ), h. 38.

<sup>22</sup> Samsu dan Mansur, Op.Cit. h. 131

<sup>23</sup> Samsu dan Mansur, Op.Cit. h. 131



melalui media yang ada, dalam hal ini maka da'i harus memilih media yang paling efektif untuk menyampaikan dakwah dan mencapai tujuan dakwah Islam.<sup>24</sup>

#### 6) Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah perilaku sasaran agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga maupun sosial kemasyarakatannya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Sementara itu M. Natsir, mengemukakan, bahwa tujuan dari dakwah itu adalah;

- a) Memanggil kita pada syari'at, untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persolanan rumah tangga, berjamaah masyarakat, berbangsa-bersuku bangsa, bernegara dan berantar-nergara.
- b) Memanggil kita pada fungsi hidup sebagai hamba Allah SWT di atas dunia yang terbentang luas yang berisikan manusia secara heterogen, bermacam karakter, pendirian dan kepercayaan, yakni fungsi sebagai *Syuhada 'ala an-Naas*, menjadi pelopor dan pengawas manusia.
- c) Memanggil kita kepada tujuan hidup yang hakiki, yakni menyembah Allah SWT.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Fadly Usman, *Efektivitas Penggunaan Media Online Sebagai Sarana Dakwah*, (Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam (al-Tsiqoh), 2016), h. 2.

<sup>25</sup> Samsu dan Mansur, *Loc. Cit.*

Sedangkan tujuan dakwah secara khusus dakwah merupakan perumusan tujuan umum sebagai perincian daripada tujuan dakwah tersebut di atas.

#### **d. Dakwah *Bil Hal* dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Islam**

##### 1) Definisi Dakwah *Bil Hal*

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa dakwah merupakan upaya yang sistematis untuk mengajak, menyeru, atau mengusahakan bagaimana manusia lainnya dalam lingkungan sosialnya dapat hidup selaras dengan tuntunan Allah SWT, dan Rasul-Nya. Makna dakwah tersebut sekaligus menepis penyempitan makna dakwah yang selama ini hanya terfokus kepada dakwah dalam konteks *tabligh* atau ceramah saja, bahkan dakwah lebih diarahkan kepada bidang komunikasi sebagai sebuah disiplin keilmuan.<sup>26</sup> Fakta demikian tidaklah salah, karena pada dasarnya hal demikian merupakan salah satu bentuk dakwah, yaitu *dakwah bi al-Lisan*. Pada akhirnya, bentuk dakwah ini berkembang menjadi dakwah *bi al-Qalam*, dengan mengambil bentuk kerja tulisan, seperti; koran, majalah, bulletin, dan sejenisnya.

Pengertian di atas semakin membuka ruang realitas, bahwa dakwah merupakan aktivitas yang diupayakan kepada diri sendiri dan orang lain untuk terhindar dari hal-hal yang menjauhkan manusia dari Allah SWT, dan Rasul-Nya. Untuk itu ada usaha menjaga, merawat, membina, dan

---

<sup>26</sup> Teguh Ansori, "Revitalisasi Dakwah Sebagai Paradigma Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Dakwah dan Sosial* Vol.2 No.1, 2019, h. 33. Bandingkan dengan Tomi Hendra, "Profesionalisme Dakwah dalam Pemberdayaan Masyarakat", *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Volumfte 13, Nomor 01, Januari 2017, h. 164.

sebagainya supaya diri sendiri dan lingkungan sosialnya dapat selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>27</sup> Firman Allah SWT, Q.S at-Tahrim [66]: 6.<sup>28</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ قُوا ۖ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا  
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا  
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

Dakwah adalah salah satu kegiatan penting yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Kegiatan ini mempunyai landasan normatif dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Dalam al-Qur’an cukup banyak ditemukan ayat-ayat yang menyeru dan menyuruh serta memerintahkan umat Islam berdakwah dan penjelasan prinsip-prinsip cara melaksanakannya. Demikian juga dalam al-Hadits nabi terdapat berbagai anjuran dakwah dan cara melaksanakannya. dakwah dapat dimaknai memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, ataupun memohon.<sup>29</sup>

Syaikh Ali bin Shalih al-Mursyid berpendapat bahwa dakwah mengandung pengertian sebagai suatu sistem yang berfungsi menjelaskan kebenaran, kebajikan, dan petunjuk, sekaligus menguak berbagai kebathilan

<sup>27</sup> Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam”, SYAR’IE, Vol. 3 – Februari 2020, h. 3.

<sup>28</sup> Bandingkan dengan Hassan Zaeni, et al. “Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif al-Qur’an”, KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 14, No. 1, April 2020, h. 95.

<sup>29</sup> Fathul. B. Meniti Jalan Dakwah. (Jakarta: Bumi Aksara.2008). h. 17

serta media dan metodenya melalui sejumlah teknik, metode, dan media yang lain.<sup>30</sup> Penyampaian dakwah dengan amal baik yang mana amal tersebut dapat menghilangkan kemungkaran, membela kebenaran, dan menjadikan kebenaran unggul atau yang biasa disebut sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan dasar dari berdakwah dengan tindakan (*al-Hal*).<sup>31</sup>

Secara bahasa Arab dakwah *bil hal* merupakan penyatuan dari dua suku kata yaitu dakwah yang berartikan menyeru, memanggil dan mengundang, sedangkan *al-Hal* yang berartikan kenyataan, keadaan, bukti kongkrit. Yang jika disatukan dakwah *bil hal* diartikan sebagai menyeru atau mengajak dengan menggunakan bahasa perbuatan atau keadaan yang nyata (kongkrit).

Dakwah *bil hal* juga bisa diartikan sebagai keseluruhan upaya mengajak orang secara individu ataupun kelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik sesuai syariat Islam, yang dapat diartikan bahwa dakwah *bil hal* lebih menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dengan cara aksi nyata terhadap *mad'u* yang membutuhkan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> M Ali Aziz. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Nusantara. 2004). h. 11

<sup>31</sup> Lihat Taufiq Yusuf, 2012: 403. *Dakwah bil hal Ali Mansur Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jenu Melalui Komunitas Mangrove*.

<sup>32</sup> Fathul. B. *Op. Cit.* h. 43

Sebagaimana pengertian dakwah *bil hal* yang merupakan dakwah dengan menyeru, mengajak dengan perbuatan nyata, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat al-Fushilat ayat 33:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : *Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah dan yang telah mengerjakan amal sholeh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri.*<sup>33</sup>

Dakwah *bil hal* juga bisa dikatakan sebagai dakwah yang mengutamakan kemampuan kreatif seorang dai dalam menyampaikan pesan melalui perbuatan-perbuatan nyata, seperti membuka lapangan pekerjaan, memberikan keterampilan dan sebagainya.<sup>34</sup>

Dengan menggunakan perbuatan atau teladan sebagai pesannya dakwah *bil hal* bisa juga disebut sebagai dakwah alamiah, maksudnya bahwa dakwah dilakukan dengan menggunakan pesan dalam bentuk perbuatan, dan dakwah sebagai upaya pemberantasan kemungkaran secara langsung dan menekankan langsung kepada kebaikan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>33</sup> Lihat. Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* 2009: 480

<sup>34</sup> Lihat. Suisyanto Dakwah Bil Hal: *Suatu Upaya Menumbuhkan Kesadaran dan Mengembangkan Kemampuan ...* III, No.2, Desember 2002, h. 183.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان (رواه المسلم)

Artinya : Abu Sa'id Al-Khudri ra. berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, „Barang siapa yang melihat diantara kamu kemungkaran, mustilah mengubahnya dengan tangannya, maka jika tidak sanggup, (ia mengubahnya) dengan lidahnya, maka jika (dengan itu pun) tidak sanggup, (ia mengubahnya) dengan hatinya, dan (yang terakhir ini) merupakan perbuatan selemah-lemah iman.<sup>35</sup>

Dakwah *bil hal* ada bukan untuk tandingan dari dakwah *bil lisan*, akan tetapi keduanya bersifat saling melengkapi. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dakwah *bil hal* mempunyai kedudukan, dan peran penting dalam dakwah. Dakwah *bil hal* tidak bermaksud sebagai pengganti ataupun lanjutan dari dakwah *bil lisan*, namun keduanya mempunyai peran yang sama pentingnya dalam ajaran Islam. Dan agar penyampaian dakwah tersebut dapat seimbang maka antara penyampaian dengan ucapan harus diseimbangi dengan perbuatan nyata.<sup>36</sup>

## 2) Prinsip dan Proses Dakwah *Bil Hal*

Sebagai dakwah yang mengedepankan aksi nyata dalam upaya memecahkan masalah, dakwah *bil hal* memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Berikut beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan:

- a. Dakwah *bil hal* harus mampu menghubungkan ajaran Islam dengan kondisi sosial budaya dan dengan objek dakwah atau

<sup>35</sup> Lihat. Syarah Arbain an-Nawawi; Imam Nawawi, et al; Jakarta; Darul Haq (2006) no. Hadist 248

<sup>36</sup> Fathul. B.Op. Cit. h. 18

- masyarakat.
- b. Dakwah *bil hal* harus bersifat memecahkan masalah yang sedang dihadapi umat dalam suatu wilayah.
  - c. Dakwah *bil hal* harus mampu mendorong dan menggerakkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah. Misalnya dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.
  - d. Dakwah *bil hal* harus mampu membangkitkan swadaya masyarakat agar mereka dapat membangun dirinya, sekaligus dapat memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat sekitar.<sup>37</sup>

Dalam menjalankan upaya Dakwah *bil hal*, pemahaman tentang kebutuhan sebagai sasaran dakwah mutlak diperlukan. Sebagai contoh berdakwah di kalangan masyarakat miskin tidak akan efektif dengan hanya berceramah. Akan menjadi lebih efektif manakala kita memahami apa saja yang dibutuhkan orang miskin yang selanjutnya digunakan menjadi sasaran dalam berdakwah. Untuk itu berikut teori kebutuhan menurut Abraham Maslow:<sup>38</sup>

- a) Kebutuhan-kebutuhan fisiologis, kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya secara fisik seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, tidur dan sebagainya.
- b) Kebutuhan akan rasa aman, merasa aman dan terlindungi, jauh dari segala bahaya.
- c) Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki: berafiliasi dengan orang lain, diterima dan memiliki.
- d) Kebutuhan akan penghargaan. Abraham Maslow mengemukakan setiap orang memiliki kategori kebutuhan

---

<sup>37</sup> M Ali Aziz. *Op. Cit.* h. 28

<sup>38</sup> Samsul Munir. *Op. Cit.* h. 232

akan penghargaan yakni:

- 1) Harga diri yang meliputi kebutuhan akan percaya diri, kompetisi, penguasaan, prestasi, ketidak tergantung dan kebebasan.
  - 2) Penghargaan dari orang lain, meliputi prestise, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan dan nama baik.<sup>39</sup>
- e) Kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami dan menjelajahi.
- f) Kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan dan keindahan.
- g) Kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya.

Dalam pelaksanaan dakwah *bil hal* seorang dai harus mampu menerapkan beberapa proses didalamnya, agar apa yang di dawahkan bisa ditangkap dan dimengerti oleh *mad'u* dan manfaatnya juga bisa dirasakan untuk masa ini dan masa yang akan datang. Proses-proses dakwah *bil hal* di antaranya adalah:

a) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Terdapat tiga puluh delapan kata *al-Ma'ruf* dan enam belas kata *al-Munkar* di dalam al-Qur'an. *al-Ma'ruf* diartikan sebagai nama setiap perbuatan yang dipandang baik menurut agama dan akal, sedangkan *al-Munkar* diartikan sebagai setiap perbuatan yang oleh akal sehat dan oleh agama dipandang jelek. Mengajak kepada *al-Ma'ruf* dan melarang dari *al-munkar* merupakan *fardhu kifayah* bagi umat muslim. Apabila segolongan umat melaksanakannya, gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya.

---

<sup>39</sup> Samsul Munir. *Op. Cit.* h. 72



Namun *amar ma'ruf nahi munkar* bisa berubah menjadi *fardhu 'ain* apabila seseorang yang berilmu (alim) berada pada satu tempat dengan orang-orang yang bodoh seperti zina, minum-minuman keras, riba, mengadu domba, menyembah selain Allah SWT dan sifat-sifatnya, dusta, menolong orang dzalim, meninggalkan sholat dan lain sebagainya, maka wajib bagi orang alim tersebut untuk mengajak pada kebaikan dan meninggalkan keburukan.<sup>40</sup>

*Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan ruh *risalah* kenabian yang juga menjadi kewajiban bagi seluruh ummat Islam. Setiap tindakannya harus diawali pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang hendak melakukannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:

- 1) Mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat
- 2) Karakteristik orang yang ber-*amar ma'ruf nahi munkar* yaitu berilmu, sabar, lemah lembut dan penyantun.
- 3) Syarat perbuatan yang wajib diingkari yaitu perbuatan tersebut benar suatu kemungkaran kecil atau besar, kemungkaran tersebut masih ada, kemungkaran tersebut nyata, dan kemungkaran tersebut sudah disepakati dan tidak dalam perdebatan.
- 4) Cara ber-*amar ma'ruf nahi munkar* penguasa atau pemimpin yaitu tidak boleh menggunakan kekerasan senjata, dan menasehati penguasa dengan sembunyi-sembunyi.<sup>41</sup>

Selain beberapa prinsip tersebut, *amar ma'ruf nahi munkar* juga mempunyai beberapa cara pencegahan tindakan kemungkaran. Cara tersebut diambil sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, cara-cara tersebut antara lain adalah:

---

<sup>40</sup> Lihat. Imam Syafi'i. *Fatwa-Fatwa Pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* -. 1419 H: 3

<sup>41</sup> Lihat. MA Chozin. *Peran Asas Tunggal Pancasila dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras*. Jurnal Dakwah 14 (1), 1-25, 2013. 25, 2013

1) Merubah kemungkaran dengan tangan

*Taghyir al-Munkar* dengan cara ini merupakan tingkatan yang tertinggi dalam *amar ma'ruf nahi munkar*. Tingkatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tinggi disbanding dengan pelaku kemungkaran. Contohnya adalah menumpahkan minuman keras dari orang yang meminumnya, mewajibkan melaksanakan sholat dan lain sebagainya.

2) Merubah kemungkaran dengan lisan

Merubah kemungkaran dengan lisan langkah pertama harus dilakukan dengan cara yang halus, jika belum bisa maka boleh dilakukan dengan cara menasehati dan menakut-nakuti terhadap ancaman Allah SWT., dan cara yang ketiga adalah dengan mengancam pelaku kemungkaran.

3) Merubah kemungkaran dengan hati

Apabila kedua cara tidak mampu dilaksanakan, maka baginya diwajibkan mengingkari perbuatan *munkar* dengan hati, dengan cara membenci perbuatan *munkar* dan dan tidak ada alasan baginya untuk tidak melakukannya.<sup>42</sup>

b) Keteladanan

Keteladanan merupakan keselarasan dan persesuaian antara perilaku dan ucapan seorang (Da'i) dalam kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Dalam bahasa Arab kata *uswah* merupakan bahasa lain dari keteladanan yang dalam al-Qur'an sering disebutkan, kata tersebut sering dihubungkan kepada nabi Muhammad SAW, dan nabi Ibrahim AS yang mana kedua nabi tersebut merupakan nabi yang memiliki keteladanan yang baik (*uswatun hasanatur*) dalam segala sendi kehidupan baik kehidupan berdakwah maupun kehidupan sosial.<sup>43</sup>

c) Istiqomah

Istiqomah merupakan salah satu perkara yang sangat penting dalam

---

<sup>42</sup> Lihat MA Chozin. *Peran Asas Tunggal Pancasila dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras*. Jurnal Dakwah 14 (1), 1-25, 2013. 25, 2013

<sup>43</sup> Safroedin Halimi, *Etika Dakwah dalam Perspektif al-Qur'an Antara Idealitas Qur'ani dan Realitas Sosial*. (Semarang: Walisongo Press. 2008). h. 56

kehidupan seorang muslim. Dengan beristiqomah seorang muslim tidak akan dihantui perasaan takut untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan dan tidak akan sedih jika mengalami keadaan yang tidak menyenangkan.<sup>44</sup> Istiqomah sendiri merupakan kalimat yang mengandung seluruh aspek agama, ia benar-benar harus menjalankan dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT yang erat kaitannya dengan ucapan, perbuatan, dan niat seseorang.<sup>45</sup>

### 3) Dakwah *Bil Hal* dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat

Dakwah *bil hal* membahas tentang semua persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan ekonomi maka kegiatan dakwah *bil hal* harus bisa menekankan pada pengembangan kehidupan dan peningkatan taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Bentuk-bentuk pengembangannya bisa dengan cara penyelenggaraan pendidikan pada masyarakat, koperasi, penyelenggaraan usaha kesehatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi.

Dakwah *bil hal* tidak hanya berkaitan dengan masalah usaha peningkatan kesejahteraan fisik materil saja, akan tetapi masyarakat juga membutuhkan adanya usaha pengembangan sumber daya manusia. Dengan melihat ruang lingkup dakwah *bil hal* yang luas, maka dalam pelaksanaannya perlu adanya keterpaduan program, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

---

<sup>44</sup> Samsul Munir. *Op. Cit* h. 38

<sup>45</sup> *Ibid.* h. 61

dakwah *bil hal* dengan instansi-instansi yang terkait. Semua ini dilakukan agar dalam pelaksanaannya dakwah *bil hal* bisa secara totalitas dan berangkat dari akar permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang sering dikenal sebagai *empowering* atau pemberdayaan. Maka dari itu, seluruh komponen dan segenap aspek yang berkaitan dengan keberhasilan dakwah *bil hal* harus ditata secara profesional dan disesuaikan dengan kondisi *mad'u* agar dakwah *bil hal* yang dilakukan benar-benar mampu memperbaiki dan meningkatkan semangat serta kesadaran yang tulus dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam.<sup>46</sup>

Salah satu metode dalam dakwah *bil hal* (dakwah dengan aksi nyata) adalah metode pemberdayaan masyarakat, yang merupakan kegiatan dakwah dengan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi kemandirian. Metode dakwah *bil hal* dengan pemberdayaan ini selalu berhubungan dengan tiga aktor (pelaku atau elemen atau unsur), yaitu masyarakat (komunitas), pemerintahan, dan fasilitator (pendakwah). Dari tiga aktor tersebut, maka ada beberapa teknik yang menghubungkannya, teknik-teknik tersebut adalah:

- a) Teknik non-partisipasi, yang bentuknya adalah dari pemerintah, oleh pemerintah, untuk rakyat. Dalam hal ini masyarakat (komunitas) hanya menjadi obyek dari pemberdayaan, pemerintah lah yang menyusun programnya, dan fasilitator (pendakwah) diposisikan sebagai evaluator.
- b) Teknik tokenisme, yang bentuknya adalah dari pemerintah,

---

<sup>46</sup> M Ali Aziz. *Op. Cit.* h. 20

bersama rakyat, untuk rakyat. Disini masyarakat seolah-olah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dengan menyampaikan pendapat, saran dan keberatan, namun sesungguhnya hanya formalitas belaka. Pemerintah sebagai katalisator dan pendakwah sebagai implementator.

- c) Teknik partisipasi, yang bentuknya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Disini masyarakat telah mendapatkan peran dalam proses pemberdayaan, sejak perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah berperan sebagai pemenuh kebutuhan, dan fasilitator (pendakwah) berperan sebagai *controller*.<sup>47</sup>

Dakwah *bil hal* merupakan bentuk dakwah yang dapat dilakukan melalui aksi-aksi nyata di masyarakat. Dalam hal ini, dakwah tidak hanya dilakukan dengan berceramah pada *mad'u*, tetapi dai dapat menjadi fasilitator pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat bisa aktif serta partisipatif dalam memberdayakan dan mengembangkan dirinya sendiri dan tidak tergantung pada Da'i. Dengan demikian hubungan antara Da'i dan *mad'u* merupakan hubungan kemitraan yang disini masyarakat dapat berkembang dan berpikir kritis untuk membangun diri dan lingkungannya dan dapat mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya.<sup>48</sup>

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

### a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan dan kemampuan.<sup>49</sup> Sedangkan dalam Bahasa Inggris

---

<sup>47</sup> M Ali Aziz. *Op. Cit.* h. 378

<sup>48</sup> A. Faqih. *Sosiologi Dakwah: Teori Dan Praktik.* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). h. 28

<sup>49</sup> Dedy Susanto, *Optimalisasi Fungsi Pesantren Sebagai Agen Pengembangan Sdm Perspektif Dakwah*, (HIKMAH, Volume 12 Nomor 2, Desember 2018), h. 301

sering diterjemahkan dari kata *power*. Kata *power* bermakna kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang selalu hadir dalam konteks hubungan sosial antar manusia. Keberdayaan suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau upaya sadar untuk meningkatkan kemampuan atau mengubah suatu kondisi. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya rangkaian kegiatan untuk membangun masyarakat, dengan cara memberikan suatu dorongan, motivasi agar dapat membangkitkan kesadaran serta mau mengembangkannya potensi yang dimiliki.<sup>50</sup> Selain dari itu pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan.

Sebagai proses pemberdayaan adalah sebuah kegiatan untuk memperkuat keadaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk golongan masyarakat miskin. Sedangkan sebagai tujuan pemberdayaan adalah hasil dari suatu perubahan sosial dimana masyarakat memiliki daya, kekuasaan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dalam aspek apapun serta mampu menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, mampu

---

<sup>50</sup> Yudhie Agung Prihatno, *Analisis Strategi Umkm Berbasis Sumberdaya Lokal Dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo*, (Yogyakarta: Tesis Program Magister Manajemen Stie Widya Wiwaha Yogyakarta, 2019), h. 16

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan segala kewajiban hidupnya.

Secara umum, pemberdayaan diartikan pemberikuasaan yang dalam Bahasa Inggris adalah “*empowerment*” dan secara konseptual diartikan pemberdayaan. Berdasarkan arti tersebut pemberdayaan dapat diartikan seseorang atau lembaga yang memiliki daya atau usaha yang dapat mendorong atau memberdayakan orang lain sehingga menerima dan mematuhi apa yang diinginkan oleh pemberdaya. Bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumber daya yang terkait dengan aktivitas dan pekerjaannya.

Kartasasmita memberikan beberapa definisi pemberdayaan. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain penciptaan iklim dan suasana.<sup>51</sup>

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Secara konseptual, pemberdayaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Sedangkan pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata daya yang berarti upaya, usaha, akal, dan

---

<sup>51</sup> Rizal Muttaqin, *Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren* (Studi atas Peran Pondok Pesantren al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya), (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume I, No. 2 Desember 2011), h. 75

kemampuan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk melakukan mengembangkannya,<sup>52</sup> mampu berdiri sendiri dan bahkan membantu yang lain atau kita sering mendengar istilah *helping people to help themselves* artinya ketika akan memberdayakan seseorang berarti kita telah membantu seseorang untuk dapat membantu dirinya sendiri.<sup>53</sup>

Kemandirian sebagai suatu keadaan ketika seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas tugasnya, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga bebas dan mampu membuat keputusan secara mandiri. Kemandirian merupakan identitas diri seorang muslim yang berlandaskan tauhid yang kokoh, sehingga mampu untuk tampil sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi, bahkan harus tampil menjadi pemimpin sekaligus pejuang, menjadi pilar-pilar kebenaran yang kokoh.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Moh. Wardi, *Pengembangan Entrepreneurship Berbasis Learning Di Pesantren al-Amien Prenduan Sumenep dan Darul Ulum Banyuasin Pemekasan*, (Surabaya: Disertasi Doktor Universitas Sunan Ampel, 2017), 24.

<sup>53</sup> Novi Widiastuti dan Prita Kartika, *Penerapan Model Kelompok Usaha Kreatif Islami (Kukis) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren*, (Jurnal EMPOWERMENT Volume 6, Nomor 2 Oktober 2017), h. 22

<sup>54</sup> Rizal Muttaqin, *Op. Cit.*, h. 68



Menurut Utomo, konsep pemberdayaan mengandung nilai-nilai sosial dan bertujuan untuk membangun perekonomian. Pemberdayaan masyarakat adalah membantu pihak yang diberdayakan, yakni kaum lemah (fakir dan miskin) agar memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang harus ia lakukan untuk memperbaiki hidup mereka, termasuk juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan hambatan pribadi dan sosial.<sup>55</sup>

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.<sup>56</sup>

Gerakan pemberdayaan diawali dari munculnya paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (rakyat/masyarakat), yang diakui sebagai “pembangunan alternatif”.<sup>57</sup> Sangat penting untuk diperhatikan bahwa dalam suatu pemberdayaan masyarakat perlu menyangkut dimensi makro yakni pendekatan/model pemberdayaan yang digunakan, dan dimensi mikro yakni aspek psikologi manusianya yang selalu harus diperhatikan.

---

<sup>55</sup> Muhammad Anwar Fathoni, Ade Nur Rohim, *Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia*, (Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding, Vol. 2, 2019), h. 137.

<sup>56</sup> Rizal Muttaqin, *Op. Cit.*, h. 75

<sup>57</sup> I Putu Ananda Citra, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 6, No.1, April 2017), h. 32

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang memerlukan perencanaan secara menyeluruh dan terpadu, serta diperlukan adanya suatu mekanisme pemantauan yang berkelanjutan, sistem pengembangan secara sistematis, serta secara terus merevitalisasi seluruh sumber daya yang ada.<sup>58</sup>

#### **b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik- material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada

---

<sup>58</sup> Soedarso, Sutikno dan Sukardi, *Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat di Parigi Moutong*, (Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 29, No. 3, Tahun 2016), h. 164.

hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik

dan masyarakat yang ideal.<sup>59</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan.<sup>60</sup> Atau dengan kata lain membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.<sup>61</sup>

### **c. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta

---

<sup>59</sup> Ambar Teguh, *Pemberdayaan Masyarakat*. (Kompas: Jakarta. 2001) h. 53

<sup>60</sup> Dedy Susanto, *Op. Cit.* h. 95

<sup>61</sup> Moh. Wardi, *Op. Cit.* h. 27.

keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

## 2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

## 3) Keswadayaan atau kemandirian

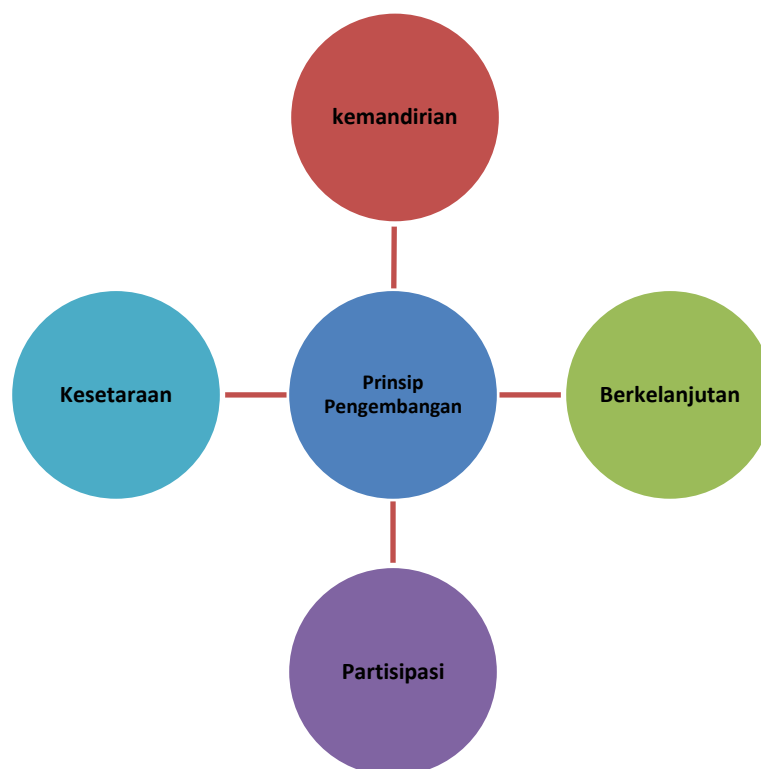
Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

#### 4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.<sup>62</sup>

### Gambar 2.

#### Prinsip Pengembangan Masyarakat Islam



Mathew mengatakan bahwa “prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten” karena itu, prinsip akan berlaku

<sup>62</sup> Najati, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. (Wetlands International: Bogor, 2015). h 24

umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.<sup>63</sup>

Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, leagans menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip perberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang disepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator pemberdayaa) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.<sup>64</sup>

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

- 1) Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- 2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau suatu pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena perasaan senang atau puas atau tidak senang/kecewaakan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang.
- 3) Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan lainnya.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Sri Handini. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan Umkm di Wilayah Pesisir*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019). h. 76

<sup>64</sup> *Ibid.* h.105

<sup>65</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h. 106

Lebih lanjut Dahama dan Bhatnagar mengungkapkan prinsi-prinsip pemberdayaan mencakup:

- 1) Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. mengenai hal ini harus dikaji secara mendalam apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun masyarakat. Kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi sesuai dengan tersedianya sumberdaya, serta minat dan kebutuhan apa saja yang menjadi prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.
- 2) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan organisasi masyarakat bawah.
- 3) Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam, disisi lain, perencanaan pemberdayaan yang seragam untuk wilayah seringkali menemui hambatan yang bersumber pada keragaman budayanya.
- 4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, setiap penyuluh perlu memperhatikan nilai-nilai budaya yang melekat pada masyarakat.
- 5) Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
- 6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi disini bukan terbatas tawar-menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metode pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sasaran.
- 7) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan perkataan lain, pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau setidaknya



memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata.

- 8) Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya) masyarakat.
- 9) Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan sendiri. dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.
- 10) Spesialis yang terlatih, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh
- 11) Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dengan kandungan maksud sebagai berikut:
  - a) Pemberdayaan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga
  - b) Setiap anggota memiliki peran/pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan
  - c) Pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama
  - d) Pemberdayaan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga
  - e) Pemberdayaan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha tani
  - f) Pemberdayaan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda
  - g) Pemberdayaan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga, memperkuat kesatuan keluarga baik terkait masalah sosial, ekonomi maupun budaya.
  - h) Mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya
  - i) Kepuasan, artinya harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan masyarakat pada program-program pemberdayaan.<sup>66</sup>

Terkait dengan pergeseran kebijakan pembangunan pertanian dari peningkatan produktivitas usahatani ke arah pengembangan agribisnis dan di lain pihak seiring dengan terjadinya perubahan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, telah muncul prinsip-prinsip:

---

<sup>66</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h.108

- 1) Kesukarelaan, artinya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus berdasarkan kesadaran dan motivasi untuk memperbaiki atau memecahkan masalah kehidupan sosial
- 2) Otonom, artinya kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan.
- 3) Keswadayaan, artinya kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatandengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau memngharap dukungan pihak luar.
- 4) Partisipatif, artinya keterlibatan semua unit atau elemen sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatan.
- 5) Egaliter, artinya menempatkan semua pemangku kepentingan dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan
- 6) Demokrasi, artinya memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan.
- 7) Keterbukaan, artinya kejujuran, saling percaya, dan saling peduli satu sama lain
- 8) Kebersamaan, artinya bersinergi berbagi rasa dan saling membantu
- 9) Akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi
- 10) Desentralisasi, artinya memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom untuk mengoptimalkan sumber daya masyarakat.<sup>67</sup>

#### **d. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Isbandi Rukminto, pemberdayaan masyarakat memiliki 7

(tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pad dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- 2) Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha

---

<sup>67</sup> Soediyanto, *Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis*. (Badiklat Depsos: Jakarta, 2001), h.108

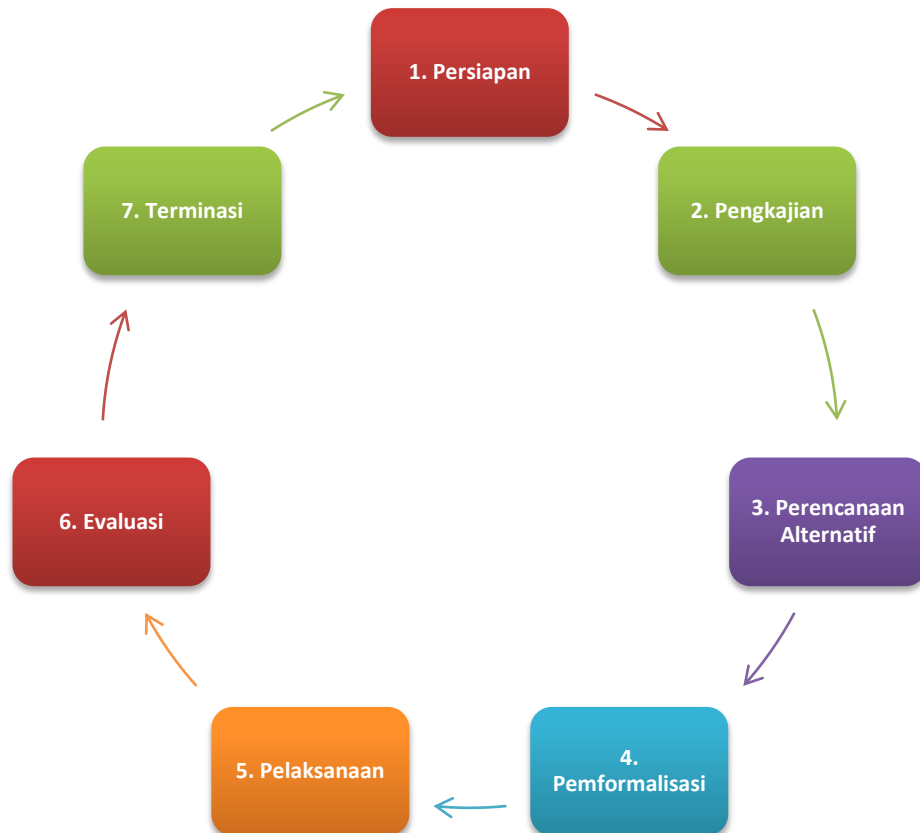
- mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
  - 4) Tahap pemfomalisasi rencana aksi, pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
  - 5) Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.
  - 6) Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
  - 7) Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Adapun bagan dari model tahapan pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2003) Edisi Revisi. h. 54

**Gambar 3.**

## Model Tahapan Pemberdayaan Masyarakat



Sedangkan menurut Sumodiningrat, upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

- 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- 3) Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi.<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah dan Membangun Masyarakat*, (Jakarta, Bina Rena Pariwisata, 1997). h 53

**Gambar 4.**

Model Tahapan Pemberdayaan Masyarakat



Selain dari model di atas, terdapat juga model pemberdayaan secara umum berdasar konsep di atas meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan relasi kemitraan,
- 2) Mengartikulasikan tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada,
- 3) Mendefinisikan arah yang ditetapkan,
- 4) Mengeksplorasi sistem yang ditetapkan,
- 5) Menganalisis kapabilitas sumber,
- 6) Menyusun frame pemecahan masalah,
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperkuat kesempatan-kesempatan,
- 8) Mengakui temuan-temuan,
- 9) Mengintegrasikan kemajuankemajuan yang telah dicapai.<sup>70</sup>

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Dakwah

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan untuk seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, guna menjadi petunjuk

<sup>70</sup> Rizal Muttaqin, *Op. Cit.*, h. 76

dalam menjalani kehidupan ini. al-Qur'an berisi ayat-ayat yang berarti etimologinya” tanda-tanda” dalam bentuk Bahasa Arab<sup>71</sup> mengandung berbagai aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan semata. Sebagai intelektual muslim dan para pewaris Nabi,<sup>72</sup> para ulama berkewajiban memperkenalkan al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesan yang tersimpan di balik setiap untaian mutiara kata dan menjelaskan nilai-nilai tersebut sejalan dengan perkembangan masyarakat, sehingga al-Qur'an dapat benar-benar berfungsi sebagai mestinya. Untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut, ulama menempuh beberapa metode, baik metode penulisan maupun pembahasan. Salah satu metode pembahasan yang paling populer digunakan ulama atau cendekiawan saat ini adalah metode *maudhu'i* (tematik) yaitu upaya menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan satu topik dan menyusunnya sebagai sebuah kajian yang lengkap dari berbagai sisi permasalahannya.<sup>73</sup> Metode ini pada dasarnya adalah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. hal itu sudah ada cikal bakalnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Kendatipun al-Qur'an mengandung berbagai macam masalah ternyata perbincangan tentang suatu masalah tidak selalu tersusun secara sistematis dalam satu surat, sehingga perlu menggunakan metode tematik tersebut. Salah satu topik yang menjadi bahan perbincaraan dan termasuk permasalahan yang

---

<sup>71</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* Juz I. (Beirut: Dar al-Fikri, tt), h.169.

<sup>72</sup> Hadits yang menjelaskan bahwa ulama adalah pewaris nabi dapat dilihat misalnya, sunan Abu Dawud Juz II, h. 341

<sup>73</sup> Mustafa Muslim, *Mabahits Fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), h.6.

sentral dalam al-Qur'an adalah pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan aspek muammalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Dalam al-Qur'an dijelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan dengan salah satu cara di antaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdayaan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S ar-Ra'd ayat 11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

*“Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah SWT menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*

Dari ayat di atas sangat jelas Allah SWT menyatakan, bahwa Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang nyata di tengah masyarakat. Kegiatan yang berupaya untuk menyadarkan masyarakat agar dapat menggunakan serta memilih kehidupannya untuk mencapai

tingkat hidup yang lebih baik dalam segala aspek. Kajian dalam tulisan ini berusaha mengungkapkan makna pemberdayaan masyarakat dan ha-hal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif al-Qur'an. Penyimpangan dari pola tingkah laku dan nilai dasar norma yang berlaku dalam hal ini nilai-nilai dasar Islam. Persoalannya menjadi jelas, tinggal yang kita perlukan adalah analisis bagaimana Islam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial tersebut. Pertama adalah pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan, konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh Islam itu sendiri. Kedua, pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karenanya, yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsep Islam.

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukanlah sebuah azab maupun kutukan dari Tuhan, namun disebabkan pemahaman manusia yang salah terhadap distribusi pendapatan (rezeki) yang diberikan. Al-Qur'an telah menyinggung dalam Q.S az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ  
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ



*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*

Adapun maksud dari ayat di atas adalah: (apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu?) yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian (kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia) maka kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin) dan kami telah meninggikan sebagian mereka dengan diberi kekayaan atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka mempergunakan, golongan orang-orang yang berkecukupan (sebagian yang lain) atas golongan orang-orang yang miskin (sebagai pekerja), maksudnya, pekerja berubah: huruf ya disini menunjukkan makna nasab, dan menurut suatu *qiraat* lafal *sukhriyyan* dibaca *sikhriyan* yaitu dengan baik (lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan) di dunia.

Demikian juga penafsiran dari Quraish Shihab, orang-orang musyrik itu tidak memiliki kunci risalah sehingga dengan seenaknya memberikan risalah kepada tokoh mereka. Bahkan kamilah yang menanggung penghidupan mereka karena mereka tidak mampu melakukan sendiri hal itu. Sebagian mereka kami berikan rezki dan kedudukan lebih banyak dan lebih baik dari yang lain, agar mereka dapat saling menolong dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Masing-masing menopang yang lain dalam mencari penghidupan dan mengatur kehidupan. Dan karunia kenabian, dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagai konsekuensinya, jauh lebih baik dari kedudukan yang paling tinggi di dunia sekalipun perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus pengingat bagi kelompok manusia yang lebih berdaya untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan dikalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus dipupuk sejak awal.<sup>74</sup>

Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q. S al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
وَالْمَنكُم ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah SWT kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah SWT, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT amat keras hukumannya”.<sup>75</sup>

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak diakibatkan sikap dan perilaku umat yang salah dalam memahami ayat-ayat Allah SWT, khususnya pemahaman terhadap kepemilikan harta

<sup>74</sup> Quraish Shihab, *Op. Cit.* h.98

<sup>75</sup> Lihat Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Karya Toha Putra, 1990)

kekayaan. Dengan demikian, apa yang kemudian disebut dalam teori sosiologi sebagai kemiskinan absolut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila umat Islam memahami secara benar dan menyeluruh (*kaffah*) ayat-ayat Tuhan tadi.

Islam pada hakikatnya adalah agama yang mengajarkan dan menganjurkan ummatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spiritual. Anjuran tersebut paling tidak tercermin dalam dua dari lima rukun Islam, yaitu zakat dan haji. Kedua pelaksanaan rukun Islam ini mensyaratkan adanya kekayaan atau kecukupan yang bersifat material. Jika pelaksanaan haji dan zakat memerlukan kecukupan material maka mencapai kecukupan itu menjadi wajib hukumnya. Dengan kata lain, rukun Islam mewajibkan ummatnya untuk berkecukupan secara material.

Krisis moneter telah mengakibatkan industri otomotif jatuh, perbankan sekarat, dan beberapa pabrik tekstil serta sepatu juga mengalami kemunduran, bahkan beberapa sektor industri kecil seperti logam dan tenun juga mengalami kesulitan karena sebagian komponen bahan bakunya masih sangat tergantung pada luar negeri. PHK terus berlangsung dan makin memperparah problem tenaga kerja serta memperbesar jumlah pengangguran, yang makin hari tentu akan menciptakan ketidakseimbangan sosial, yang pada gilirannya sangat mudah memicu munculnya kejahatan, penjarahan, pencurian, dan tindak kekerasan.

Dengan demikian kejatuhan ekonomi pada hakikatnya dapat pula dipandang sebagai kejatuhan agama. Sebab dengan merosotnya ekonomi

maka akan berdampak pada merosotnya kualitas hidup manusia secara total, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, maupun yang berkaitan dengan kualitas fisik dan nonfisik. Oleh karena itu, Nabi sendiri menegaskan “kemiskinan akan membawa pada kekufuran.”

Dalam konteks ini peranan agama menjadi sangat penting, terutama dalam kaitannya membentuk suatu etos kerja produktif dan mandiri. Jika agama dipahami secara sempit dan kemudian menegaskan bahwa kemiskinan adalah ketentuan (takdir) dari Tuhan kepada ummatnya maka kemiskinan tidak akan bisa diubah karena Tuhan sendiri yang dapat mengubahnya. Pernyataan ini tentunya akan berlawanan dengan firman Allah SWT dalam Q. S al-Baqarah ayat 268 yang artinya:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ  
وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Setan menjanjjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah SWT menjanjjikan untukmu ampunan dariNya serta karunia (kekayaan dan kenikmatan). Allah SWT maha luas KaruniaNya, serta maha Mengetahui “.<sup>76</sup>

Selanjutnya dalam Q. S ar-Ra’du ayat 11 menegaskan bahwa;

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا ۗ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Allah SWT sekali-sekali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada suatu Kaum hingga kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada dirinya”.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Lihat Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Karya Toha Putra, 1990)

<sup>77</sup> Lihat Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Karya Toha Putra, 1990)

Oleh karena itu kita harus yakin bahwa kejatuhan ekonomi sama halnya dengan kejatuhan dalam agama. Ini yang harus diubah dari pandangan kemiskinan karena persoalan kemiskinan bukanlah janji Tuhan, melainkan janji setan. Kemiskinan dalam Islam lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian. Karena itu, dalam konsep pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan, investasi, dan sebagainya), juga pada faktor non-ekonomi.

Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan kemiskinan. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititikberatkan pada menghapuskan penyebab kemiskinan bukan pada penghapusan kemiskinan semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara (*temporer*). Demikian pula, di dalam mengatasi problematika tersebut, Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberi tuntutan berusaha agar rakyat biasa mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan apa yang dimilikinya, sesuai dengan keahliannya.<sup>78</sup>

Rasulullah SAW memberi tuntutan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Karena konsepsi pemberdayaan dalam Islam adalah bersifat menyeluruh (*holistik*) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar

---

<sup>78</sup> al-Qahtani. *Op. Cit.* h. 87

kehidupan. Rancangan model pemberdayaan yang harus dibangun pun harus mengacu pada hal tersebut.<sup>79</sup>

Kata *'ajiz* dalam al-Qur'an ada 10 yaitu dalam surat al-Maidah 31, al-Jin 12, Fathir 44, al-Anfal 59, Hud 72, adz-Dzariyat 29, asy-Syu'ara 171, as-Shaffat 135, Haqaah 7, dan al-Qamar ayat 20. Dalam hal ini penulis hanya memaparkan Q. S al-Qamar ayat 20 dengan penjelasan sebagai berikut:

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ

*“Yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya”.*<sup>80</sup>

Ayat tersebut turun ketika terjadinya kebinasaan kaum Nabi Nuh dan kaum 'Aad. Maksud dari ayat tersebut adalah “Sungguh lemah keadaan mereka, padahal sebelumnya mereka (kaum 'Aad) mengatakan, “Siapakah yang lebih kuat daripada kami?” Mereka tidak menyadari, bahwa Allah SWT yang menciptakan mereka tentu lebih kuat dari mereka. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat dan kelompok lemah lainnya. Mereka adalah kelompok yang pada umumnya kurang memiliki kemampuan. Oleh karena itu untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialainya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya, meliputi: Baik secara kelas, gender, maupun etnis. Kelompok lemah khusus, seperti

<sup>79</sup> Suharto. *Op. Cit.* h. 73

<sup>80</sup> Lihat Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Karya Toha Putra, 1990)

manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, masyarakat terasing. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga. Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari 'keumuman' kerap kali dipandang sebagai penyimpangan. Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan sebagaimana berikut:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Idea tau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
- e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

- f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.<sup>81</sup>

Adapun strategi dalam memberdayakan masyarakat lemah tersebut

adalah:

- a. Pemungkinan; menciptakan Susana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultura dan structural yang menghambat.
- b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan keimanan serta kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri dan keimanan masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah. Mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang merugikan rakyat kecil.
- d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
- f. Pendampingan sosial dan pemberdayaan, strategi yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesiau dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar membantu dirinya sendiri. Dalam konteks ini peranan pekerja sosial seringkali

---

<sup>81</sup> Akhyadi, A. S., Ramadani, R. F., & Siregar, H. L. *Strategy Empowerment Weed Scavengers and Weed Craftsmen Through A "Holistic Development" Approach* (Case Study at Saguling Bening Foundation and Bangkit Joint Cooperative in Cihampelas District, West Bandung Regency) (2020) Ade. 9, 1–11



diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyempuh atau pemecah masalah.<sup>82</sup>

Kata *Tamkin* dalam al-Qur'an terdapat dalam beberapa surat yaitu: al-Qur'an Surat al-Anfal 71.

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, Maka Sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah SWT sebelum ini, lalu Allah SWT menjadikan(mu) berkuasa terhadap mereka. dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>83</sup>

Dan dalam Q. S al-Mukminun 13,

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ

*“Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).”*

Juga dijelaskan dalam Q. S at-Takwir 20,

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ

*“Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan Tinggi di sisi Allah SWT yang mempunyai 'Arsy”*

Termaktub juga dalam Q. S Yusuf ayat 54, dengan pemaparan sebagai berikut:

<sup>82</sup> Gunawan Sumohadiningrat, *Op. Cit.* h. 90

<sup>83</sup> Lihat Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Karya Toha Putra, 1990)

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ  
لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

“Dan raja berkata: “Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat denganku.” Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengannya, dia berkata: “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami”<sup>84</sup>.

Adalah kesempatan emas, yang disenangi oleh banyak manusia, khususnya bagi para pengembara kursi (jabatan), tahta, dan dunia, tatkala dihadapkan pada sebuah tawaran, untuk duduk di atas kursi (jabatan). Kalau kursi jabatan diduduki oleh orang luar, siapa yang akan melakukan perubahan, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, mewujudkan syariat Islam dan sistem kenegaraan yang bernuansa Islam, Segala sesuatu itu apabila sudah dikuasai dan dipegang kepalanya, yang lain akan mudah dikendalikan dan dikuasai. Setelah itu diikuti oleh ayat yang selanjutnya,

Dijelaskan dalam Q. S Yusuf: 55 yaitu:

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ  
لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

“Berkatalah Yusuf: “Jadikanlah aku bendahara negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.”<sup>85</sup>

Karena ucapan ini terjadi setelah Nabi Yusuf mengatakan kepada raja:” Jadikanlah aku bendahara negara (Mesir).” Bentuk permohonan Nabi

<sup>84</sup> Lihat Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Toha Karya Putra, 1990)

<sup>85</sup> Lihat Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT.Karya Toha Putra, 1990)

Yusuf kepada raja, bahwa ia mampu mengurus (sebagai bendahara) negara Mesir, menunjukkan, bahkan sekaligus sebagai pemberitaan bahwa beliau memiliki kemampuan dalam hal ini.

Perlu diketahui sekali lagi, bahwa Nabi Yusuf mengucapkan ucapan yang mengandung pujian terhadap dirinya tersebut adalah ketika beliau telah mendapatkan kedudukan dan kepercayaan di sisi raja. Bukan serta merta beliau memuji dirinya untuk meraih kedudukan. Tentu hal ini berbeda dengan keadaan para kontestan pemilu atau para politikus yang berkampanye memuji diri dalam rangka meraih kedudukan dan ambisi politiknya.

Asy-Syaikh as-Sa'dit dalam *Tafsir al-Lathiful Mannan*, berkata setelah menyebutkan ayat di atas: “Pada ayat ini terdapat keutamaan ilmu, ilmu syar’i dan hukum, ilmu tabir mimpi, ilmu mengatur dan mengurus negara, serta ilmu pemerintahannya. Yang menjadi salah satu sebab Nabi Yusuf memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat kelak, yaitu adanya ilmu yang beragam dan banyak (mengetahui berbagai macam ilmu). Dengan adanya beragam ilmu yang dimiliki, tentu saja dapat melakukan perubahan atau menciptakan proses pemberdayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari para penguasa. Dalam hal ini, pelaku pemberdayaan hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap yang dilakukannya. Bukan hanya ilmu yng

diperlukan, namun mendedikasikan diri terhadap perubahan masyarakat jauh lebih penting untuk dimiliki oleh para pelaku pemberdayaan.<sup>86</sup>

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.<sup>87</sup> Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat”.<sup>88</sup>

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihan-pilihannya, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggungjawab demi perbaikan kehidupannya.<sup>89</sup>

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku ke arah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini yakni, baik dari aspek

---

<sup>86</sup> Achmad Tirtosudiro, *Model Pembangunan Qaryah Thayyibah*. (Jakarta: Intermedia 1997). h. 63

<sup>87</sup> Aprillia Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 115

<sup>88</sup> Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.3

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 117

pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka.<sup>90</sup>

Dari beberapa pemahaman tentang pemberdayaan tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan yang sering dikenal dengan istilah *empowerment* merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk memberikan *power* (daya, kekuatan, tenaga, kemampuan dan kekuasaan) kepada individu maupun kelompok dengan tujuan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan mereka baik dari aspek ekonomi, pendidikan, spiritual, ataupun aspek sosial suatu individu maupun kelompok.

Dengan demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri bisa saja berbeda sesuai dengan bidang pemberdayaan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Isbandi Rukminto Adi: “Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan dibidang pendidikan ataupun bidang sosial. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil. Tujuan pemberdayaan pendidikan adalah agar sasaran dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, dan tujuan pemberdayaan sosial misalnya untuk menjalankan fungsi sosial sasaran sesuai peran dan tugas sosialnya.”<sup>91</sup>

Kemudian kesuksesan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut salah satunya sangat bergantung pada agen pemberdayaan yang memiliki

---

<sup>90</sup> *Ibid.* h. 55

<sup>91</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 78-79

kompetensi sesuai tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Kita ketahui bahwa alam begitu cepat berubah, ilmu pengetahuan pun juga seperti demikian. Jika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, maka seorang agen pemberdayaan (*agent of empowerment*) mesti memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang selalu mengikuti perkembangan zaman.<sup>92</sup>

Perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah melahirkan tingkat persaingan yang makin ketat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah pemenuhan segala aspek kebutuhan masyarakat, baik aspek ekonomi maupun aspek sosial. Oleh sebab itu, masyarakat yang tidak diberdayakan sesuai dengan perkembangan zaman yang serba canggih, maka mereka tidak akan sanggup bersaing secara global.

Setiap individu harus beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Profesi seperti guru, dosen, penyuluh, mubaligh, pekerja sosial, agen pemberdayaan, atau aparatur pemerintah merupakan profesi yang bertugas memberikan pencerahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang ingin diberdayakan. Profesi seperti ini mestilah membawa perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan keilmuan yang digelutinya. Begitu juga dengan mahasiswa, siswa, maupun masyarakat umum mesti mengikuti perubahan zaman tersebut.<sup>93</sup> Hal ini mesti diperhatikan oleh setiap elemen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana

---

<sup>92</sup> *Ibid.* h. 55

<sup>93</sup> *Ibid.* h. 4-5

individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Untuk mewujudkan itu semua, tentu mereka harus memiliki banyak pengetahuan dan tidak ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih.

Maka dari itu, setiap individu maupun kelompok yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan harus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat yang akan diberdayakan pun mesti diberi motivasi yang kuat agar mereka mampu mandiri dan mampu menjadikan diri mereka berdaya dalam segala aspek. Dengan kata lain, seperti yang diungkapkan oleh Isbandi Rukminto Adi, bahwa “Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus mereka lakukan terkait dengan upaya mereka dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga mereka mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depannya.”<sup>94</sup>

Oleh karena itu, agen pemberdayaan hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan bertindak sebagai orang yang seakan lebih pintar daripada masyarakat yang akan diberdayakan. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadikan individu atau kelompok berdaya dalam mengatasi permasalahan ekonomi saja, seperti biaya hidup, makanan, tempat tinggal dan lainnya. Akan tetapi, masyarakat

---

<sup>94</sup> Brahmento, E., Hermawan, H., & Hamzah, F. *Strategi Pengembangan Kampung Batu Malakasari Sebagai Daya*. (Jurnal Media Wisata, 15(2), 2017). 588–600

tersebut juga memiliki daya atau kemampuan dari aspek pengetahuan, spiritual, dan juga aspek sosialnya. Karena permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak hanya masalah ekonomi saja, namun juga ada masalah pengetahuan, masalah spiritual, dan masalah kehidupan sosial mereka dengan individu maupun kelompok lainnya.

Terkait dengan hal ini, agen pemberdayaan (*agentofempowerment*) mesti mengingat bahwa konsep utama pemberdayaan masyarakat tidak hanya memandang kesejahteraan material saja, namun juga harus memperhatikan kesejahteraan spiritual masyarakat yang akan diberdayakan. Seperti yang dikatakan oleh Moh. Ali Aziz bahwa “Konsep utama dari pemberdayaan adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya dari pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.”<sup>95</sup>

Dengan demikian, lingkup kegiatan pemberdayaan tidak hanya terpaku dengan pemberdayaan pada aspek ekonomi saja, namun juga bisa dilakukan dengan memberdayakan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan, memberdayakan spiritual masyarakat melalui nasehat keagamaan dan juga penyuluhan, serta memberdayakan aspek sosial masyarakat dengan menanamkan sikap saling peduli dan mau membantu individu ataupun kelompok dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

---

<sup>95</sup> Moh. Ali Aziz, *Op. Cit.* h. 170



Maka dari itu, terciptalah masyarakat yang tidak hanya mementingkan kehidupan ekonomi semata, namun juga mementingkan ketentraman jiwa serta keluhuran akhlaknya dalam menjalani kehidupan. Disamping itu, terciptanya masyarakat yang berjiwa sosial tinggi, karena setiap individu maupun kelompok yang sudah berdaya berusaha membantu masyarakat lainnya yang tertinggal dan belum berdaya dari aspek-aspek yang telah penulis sebutkan sebelumnya.

Selanjutnya, seorang agen pemberdayaan (*agent of empowerment*) juga harus mengetahui faktor penyebab ketidakberdayaan suatu masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Jim Ife, yakni:<sup>96</sup>

Karena tidak memiliki kekuatan (*powerless*), seperti:

- a. Kekuatan atas pilihan pribadi  
Upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
- b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri  
Pemberdayaan dapat dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
- c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi  
Pemberdayaan dilakukan dengan cara mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
- d. Kekuatan kelembagaan  
Pemberdayaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, struktur pemerintahan, dan lainnya.
- e. Kekuatan sumber daya ekonomi  
Pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan mengakses dan mengontrol kegiatan ekonomi.
- f. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi

---

<sup>96</sup> Lihat Jim Ife, et al., *Community Development; Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Terj. Sastrawan Manullang, et.al., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 60-64

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara memberikan kebebasan kepada mereka dalam menentukan proses reproduksi.<sup>97</sup>

Karena adanya ketimpangan (*disadvantaged*), seperti:

- a. Ketimpangan struktural yang terjadi diantara kelompok primer seperti: Perbedaan kelas, orang kaya dengan orang miskin, buruh dengan majikan. Ketidaksetaraan jender, perbedaan ras dan etnis yang tercermin pada perbedaan antara masyarakat lokal dengan pendatang dan antara kaum minoritas dengan kaum mayoritas.
- b. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, keterbatasan fisik, mental dan intelektual.
- c. Ketimpangan personal akibat faktor kematian, kehilangan orang-orang yang dicintai, persoalan pribadi, dan keluarga.<sup>98</sup>

Dari beberapa faktor penyebab ketidakberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Jim Ife tersebut, dapat dicermati bahwa setiap elemen masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan mesti mengetahui terlebih dahulu aspek apa (aspek ekonomi, pendidikan, spiritual, atau aspek sosial) yang harus diberdayakan dan mengetahui apa saja faktor penyebab ketidakberdayaan masyarakat dari setiap aspek-aspek tersebut.

Kegiatan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika sebelumnya sudah dilakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan sosial. Dalam hal ini, perlu diklarifikasi apakah akar penyebab ketidakberdayaan berkaitan dengan faktor kelangkaan sumber daya atau faktor ketimpangan, atautkah kombinasi antara keduanya.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Jim Ife. *Op. Cit.* h. 117

<sup>98</sup> Moh. Ali Aziz. *Op. Cit.* h. 95

<sup>99</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013),

Dalam ilmu kedokteran, seorang dokter mesti mencari tau terlebih dahulu apa penyakit yang diderita oleh pasiennya, dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan pasien tersebut bisa sakit. Kemudian, barulah dokter tersebut memberikan obat kepada pasien sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Begitu juga dengan agen pemberdayaan yang mesti mencari tau terlebih dahulu aspek apa yang harus diberdayakan dan apa faktor penyebab ketidakberdayaan dari masyarakat tersebut (faktor ketiadaan kekuatan/daya atau karena faktor ketimpangan, atautkah karena kombinasi kedua faktor tersebut). Setelah itu, barulah agen pemberdayaan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan faktor penyebab ketidakberdayaan masyarakat tersebut.

Selain mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakberdayaan masyarakat yang dikemukakan Jim Ife tersebut, hal yang paling penting diperhatikan oleh agen pemberdayaan adalah mengetahui terlebih dahulu, siapa masyarakat yang akan diberdayakan tersebut.<sup>100</sup> Dalam hal ini, Oos M. Anwar mengemukakan bahwa masyarakat yang akan diberdayakan tersebut

---

<sup>100</sup> Terkait dengan term atau istilah untuk masyarakat yang akan diberdayakan tersebut, penulis lebih setuju dengan istilah “penerima manfaat”, karena istilah ini lebih Terkait dengan term atau istilah untuk masyarakat yang akan diberdayakan tersebut, penulis lebih setuju dengan istilah “penerima manfaat”, karena istilah ini lebih memperlihatkan bahwa masyarakat merupakan pelaku utama dan mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat dari kegiatan pemberdayaan, namun mereka juga merupakan pengelola sumber daya yang bersifat aktif dan partisipatif serta berhak diperlakukan sebagai mitra kerja dalam kegiatan pemberdayaan. Bukan dijadikan sebagai “kelompok sasaran” (lihat istilah ini dalam Isbandi Rukminto Adi, loc.cit.), bukan seperti “target” (Lihat istilah ini dalam Lihat Randy R. Wrihatnolo, et al., Manajemen Pemberdayaan; Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, [Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007], h. 3) dan juga bukan dijadikan sebagai “objek” pemberdayaan masyarakat yang terkesan seakan-akan masyarakat yang diberdayakan bersifat pasif dan menerima apa adanya serta tidak mempunyai inisiatif sendiri dibandingkan dengan fasilitatornya. (Untuk lebih jelasnya baca Totok Mardikanto, et al., Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, [Bandung: Alfabeta, 2013], h. 130).

adalah masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*) dari aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tersebut mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan suatu masyarakat.<sup>101</sup>

## **B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Islam**

### **1. Pengertian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Islam**

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya, dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*Independent*) dan mandiri.<sup>102</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah penekanan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar

---

<sup>101</sup> Oos M. Anwar, *Op.Cit*, h. 48

<sup>102</sup> Harry Hikmat. *Op.Cit*. h. 54

menekankan kepada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan *bottom-up*<sup>103</sup>, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam walaupun dalam satu komunitas. Dalam hal ini agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi inilah yang menjadi acuan agen pemberdayaan untuk menentukan perencanaan pemberdayaan (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan klien/sasaran. Keterlibatan sasaran dalam tahapan perencanaan ini merupakan salah satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional untuk mensukseskan pemberdayaan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P<sup>104</sup>, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

1) Pemungkinan

Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

---

<sup>103</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 2

<sup>104</sup> Suharto. *Op. Cit.* h. 99

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang menghambat.

- 2) Penguatan  
Penguatan berarti memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan  
Perlindungan berarti melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan  
Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan  
Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.<sup>105</sup>

Dubois dan Miley menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- a) Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefeksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien/sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu serta menekankan kerjasama klien (*self partnerships*).
- b) Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk menghormati dan harga diri klien/sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien/sasaran.

---

<sup>105</sup> *Ibid.* h. 72

- c) Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, mengharagai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar serta melibatkan klien/sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.
- d) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, melaakukan riset dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidakselarasan kesempatan.<sup>106</sup>

Semua cara atau teknik di atas menunjukkan perlunya menempatkan sasaran pemberdayaan sebagai subjek yang memiliki keragaman karakter, potensi dan kebutuhan. Masalahnya adalah bagaimana agen pemberdayaan dapat membangkitkan kesadaran dan memotivasi klien/sasaran agar mampu menggali potensi diri dan lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Strategi pemberdayaan hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Menurut Suyono, gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model (laboratorium). Suatu model cenderung harus membuat dulu ebuah model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi,

---

<sup>106</sup> *Ibid.* h. 145

permasalahan dan kebutuhan serta cara/pendekatan mereka. Dengan demikian kondisi masyarakat lokal.

Masyarakat juga sangat heterogen. Oleh karena itu tanggapan, penerimaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tentu akan berbeda. Dengan disebarluaskan kepada berbagai masyarakat, pada akhirnya akan terjadi proses penyesuaian. Keberhasilan juga akan beragam. Secara kuantitas logika keberhasilan pemberdayaan dapat diumpamakan seperti : Pemerintah/Lembaga A misalnya menyemai 1000 benih pemberdayaan kepada masyarakat dan setelah dinilai yang berhasil sebanyak 300. Sedangkan Pemerintah/Lembaga B menyemai 50 benih yang akan dijadikan model pemberdayaan dan setelah dinilai yang berhasil hanya 25. Coba bandingkan kedua pemerintah/lembaga tersebut, mana yang dinilai berhasil ? dalam konteks gerakan masyarakat, yang berhasil tentu saja pemerintah/lembaga A.

Implikasi dari logika diatas adalah bahwa model pemberdayaan tidak bisa ditempuh dengan cara membuat dulu model tertentu hingga keberhasilannya teruji. Model yang sudah teruji ditempat uji coba, belum tentu berhasil/cocok ditempat lain, karena masyarakat sangat heterogen dan dinamis. Dalam gerakan masyarakat, model dan strategi pemberdayaan tidak bisa diseragamkan. Hal ini disesuaikan dengan potensi, kebutuhan dan permasalahan yang ada dalam masyarakat. oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat disesuaikan dnegan kebutuhan dan



kondisi dilapangan. Dalam hal ini agen pemberdayaan perlu memiliki kemampuan merumuskan program dan strategi yang tepat dan efisien.

## 2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Islam

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategeia* (stratus: militer; dan ag: memimpin), yang artinya seni atau ilmu. Seperti yang dikemukakan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr, konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu: (1) dari perspektif apa yang suatu organisasi akhirnya lakukan. Perspektif yang pertama menekankan bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.<sup>107</sup>

Ada tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktek perubahan sosial, yaitu; tradisional, *direct action* (aksi langsung) dan transformasi.<sup>108</sup> Setiap strategi terdiri dari teori<sup>109</sup>, konsep<sup>110</sup>, dan keahlian<sup>111</sup>

---

<sup>107</sup> Anang Mardianto. *Analisis Pengaruh Komunikasi Atasan Bawahan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Di Pt. Perusahaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Surakarta*. (2007).

<sup>108</sup> Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (Strategies for Community empowerment): direct action and transformative approaches to social change practice. Buku tersebut mengkaji strategi pemberdayaan dan faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Strategi direct action membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Strategi transformative menunjukkan bahwa Pendidikan massa dalam jangka Panjang dibutuhkan sebelum peng-identifikasian kepentingan diri sendiri.

<sup>109</sup> Teori adalah seperangkat ide atau gagasan yang diformulasikan berdasarkan alasan-alasan dari fakta-fakta yang ada untuk menjelaskan sesuatu. Teori sering diidentifikasi secara tentatif-spekulatif sebagai ide-ide yang bersifat alamiah yang sayangnya diletakkan bertentangan dengan sejarah dari praktek atau pelaksanaannya. Dalam pola Yunani teori diartikan sebagai upaya

yang melekat erat pada masing-masing strategi yang kemudian dirinci kedalam delapan teorin khusus, sepuluh konsep, dan duabelas keahlian.

Kata pemberdayaan mengesankan adanya adanya sikap mental yang tangguh atau kuat. Praktek dan kegiatan yang berbasiskan pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian mengkomunikasikan kekuatan yang Tangguh untuk mengubah hal yang terkandung dalam diri kita, orang lain, serta masyarakat di sekitar kita. Elaborasi dari pemikiran tersebut, secara keseluruhan akan dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan masyarakat sehingga akan membawa dampak yang sangat luas, baik terhadap kecenderungan primer maupun sekunder dari makna pemberdayaan.<sup>112</sup>

Secara khusus, pemberdayaan dilakukan dalam rangka mengurangi eliminasi, serangan, dan valuasi negatif oleh kelompok-kelompok yang berkuasa dalam masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan individu dan kelompok sosial. Boleh jadi, hal ini sangat memperkuat anggota keluarga untuk bertahan. keadaan ini diekspresikan oleh pekerja

---

menghidupkan kembali kedekatan hubungan antara teori dan praktek, sebagaimana praksis melekat dalam observasi sistematika kualitas dan gambaran dengan kekuatan terhadap kritik praktis dan konvensional

<sup>110</sup> Konsep adalah ide-ide atau gagasan-gagasan. Dalam praktek perubahan sosial, ide merupakan karakteristik dari praktek. Secara umum, konsep bukanlah penjelasan teori-teori dan kekhususan pelaksanaan dari keahlian tertentu.

<sup>111</sup> Keahlian yang dalam arti lain disebut keterampilan adalah sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Karena itu, keterampilan atau keahlian berkembang secara terus menerus dan mengalami pengulangan. Lihat Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Penerbit Buku Pendidikan-Anggota Ikapi, Berhidmat Untuk Ilmu: Bandung. 2013). h 15-27

<sup>112</sup> Goodman, B., & Hirschman, A. O. (1959). *The Strategy of Economic Development*. *Journal of Farm Economics*, 41(2), 468–468. <https://doi.org/10.2307/1235188>

sosial dalam budaya keluarga. Pada prakteknya, para pekerja sosial mengalami kesulitan dalam melaksanakan strategi pemberdayaan karena agensi mereka hanyalah sistem sosial bagi kelompok minoritas tersebut.

Dominasi ini untuk melindungi staf dari potensi kekerasan etnis minoritas tersebut dalam valuasi negative yang lazim disebut *Institutional Racis*. Biasanya, orang-orang yang ada dalam kelompok sosial tersebut menderita akibat kitakadaan kemampuan, bukan karena kegagalan kemampuan.

Berdasarkan tahapannya, ada 3 tingkatan pelaksanaan pemberdayaan yang harus dilakukan:

- 1) Pengalaman positif dalam keluarga yang memberikan rasa percaya diri dan persaingan dalam interaksi sosial.
- 2) Memaksa kemampuan mereka untuk mengatur kehidupan sosial dan menggunakan institusi sosial untuk memperoleh kompetensi.
- 3) Mereka dapat menerima dan menampilkan nilai-nilai sosial.<sup>113</sup>

Kemiskinan yang menjerat dan menghimpit mereka telah berperan besar dalam menumbuhkembangkan ketidakberdayaan mereka, mengurangi kepercayaan diri dalam interaksi sosial. Mengenai hal ini pekerjaan sosial yang lebih dikonsentrasikan pada perubahan individu daripada lembaga sosial akan dapat menyebabkan titik lemah dalam berhubungan dengan kekuatan lainnya. Karena itu jawaban yang paling tepat untuk mereka adalah proses pemberdayaan. Proese pemberdayaan yang dimaksud adalah:

- 1) Mendapatkan kembali eksistensi dan jati diri untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi.

---

<sup>113</sup> Anang Mardianto. *Op. Cit*, h 43

- 2) Ilmu pengetahuan dan *skill* (keahlian dan Keterampilan) pekerja sosial dapat digunakan oleh klien secara optimal
- 3) Pekerja sosial sebagai partner yang baik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi
- 4) Struktur kekuasaan rumit dapat diubah menjadi terbuka untuk dapat mempengaruhi kehidupan mereka<sup>114</sup>

Sementara itu, model praktek proses pemberdayaan yang harus dilakukan sebagai berikut:

- 1) Memberikan respons di antara klien dari valuasi negatif sehingga mereka dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi
- 2) Memperoleh dukungan efektif-efesien dalam memecahkan berbagai masalah diatas.<sup>115</sup>

Pengertian pemberdayaan dapat dipahami melalui pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) yang bertujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat. Penempatan aspek manusia dalam pendekatan ini adalah sebagai fokus utama dan sumber utama pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya dipandang sebagai obyek pembangunan tetapi sekaligus subyek atau pelaku utama pembangunan dan peran pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator yang memfasilitasi tumbuhnya prakarsa dan kemandirian masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengatakan bahwa pemberdayaan sebagai konsep yang sedang populer mengacu pada usaha menumbuhkan keinginan pada Bookman dan Morgen seseorang untuk mengaktualisasikan

---

<sup>114</sup> Fadhil, R., Maarif, M. S., Bantacut, T., & Hermawan, A. (2017). *Model Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Agroindustri Kopi Gayo dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Jurnal Manajemen Teknologi, 16(2), 141–155. <https://doi.org/10.12695/jmt.2017.16.2.3>

<sup>115</sup> Anang Mardianto *Op. Cit.* h. 73

diri, melakukan mobilitas ke atas, serta memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya.<sup>116</sup>

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah: program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf, dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat serta berkelanjutan.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat penentu kebijakan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan yang semakin terbatas. Hal ini akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan memperkuat berkelanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab.

Program semacam ini secara umum berkonsentrasi pada pengembangan keterampilan dan perilaku ditingkat kelompok. Perubahan ditingkat kebijakan, terutama mereka yang berada dalam situasi pemerintahan, terabaikan. Padahal perubahan kelembagaan sangat besar kontribusinya terhadap peningkatan kehidupan masyarakat dalam

---

<sup>116</sup> Ann Bookman, Sandra Morgen. *Women and the Politics of Empowerment*. (Amazon.sg: Books. 1988). h. 81

menanggulangi kemiskinan dalam skala besar. Kenyataannya, perubahan struktur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat membutuhkan lebih banyak sumberdaya dibandingkan untuk tingkat lapangan.<sup>117</sup>

Dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat sejumlah hambatan kebijakan dan kelembagaan dalam menerapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil. Hambatan ini antara lain adalah terbatasnya komitmen dan pemahaman manajer senior dan para penentu kebijakan terhadap prinsip dan keuntungan yang bisa diperoleh dari pendekatan pemberdayaan masyarakat serta kurangnya orientasi pada klien oleh aparat pemerintah di semua tingkatan. Disamping itu, hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal. Lebih jauh lagi, penyusunan kebijakan rinci menghambat timbulnya kreatifitas lokal. Hambatan lain adalah kekurangan data monitoring dan evaluasi serta masih adanya struktur pemerintahan dan proses perencanaan yang bersifat membatasi.<sup>118</sup>

Dengan demikian strategi pemberdayaan adalah pola pemberdayaan masyarakat yang dianut oleh pekerja sosial atau pelaku pemberdayaan dalam memberdayakan masyarakat agar pemecahan masalah sosial kemasyarakatan dapat ditanggulangi dengan berkesinambungan dan mampu menjadi solusi sekaligus terobosan dalam pembangunan masyarakat.

Secara umum, ada empat strategi pengembangan masyarakat, yaitu:

---

<sup>117</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h 62

<sup>118</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h 63

- 1) *The Growth Strategy*  
Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekosistem, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama di pedesaan.
- 2) *The Welfare Strategy*  
Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam arti masyarakat maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu dalam setiap usaha pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontraproduksi dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks yang sedemikian inilah dakwah dengan model pengembangan atau pemberdayaan masyarakat menjadi sangat relevan karena salah satu tujuannya adalah mengupayakan budaya mandiri masyarakat.
- 3) *The Responsitive Strategy*  
Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksud untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan sendiri dengan bantuan pihak luar (self-need and assistance) untuk memperlancar usaha sendiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.
- 4) *The Integrated or Holistic Strategy*  
Untuk mengatasi delima pemberdayaan masyarakat karena kegagalan dari ketiga strategi yang dijelaskan di atas, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok ketiga strategi di atas menjadi alternatif strategi pemberdayaan.<sup>119</sup>

Pemberdayaan merupakan jawaban atas realita ketidakberdayaan (*disempowerment*). Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan mempunyai beberapa aspek yaitu:

---

<sup>119</sup> Forss, A. H. (2017). *Involving the Community*. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1ddr7g8.9>

- 1) Dapat memberikan kemampuan secara dasar sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi kelompok-kelompok masyarakat.
- 2) Karena adanya upaya pembangunan yang akan memberikan suatu kapasitas dan dapat menggerakkan berlangsungnya roda perekonomian
- 3) Dengan adanya upaya pemberdayaan dapat mewujudkan pembangunan masyarakat yang menekankan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan.
- 4) Dengan adanya proses perubahan sosial, maka dapat memberikan pengaruh yang lebih besar memungkinkan orang-orang baik secara lokal maupun nasional.
- 5) Dengan adanya pemberdayaan maka dapat memberi kekuatan kepada masyarakat lemah.<sup>120</sup>

Oleh karena itu dalam strategi ini terdapat tiga prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Persamaan, keadilan pemetaan dan partisipasi merupakan tujuan yang eksplisit harus ada dari strategi menyeluruh sehingga badan publik yang ditugasi melaksanakan harus:
  - a) Memahami dinamika sosial masyarakat sebagai intervensinya.
  - b) Intervensi dilakukan untuk memperkuat kemampuan masyarakat sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya serta kemampuan aparatur (pemerintah atau policy maker) untuk melakukan intervensi sosial.
  - c) Memerlukan perubahan-perubahan mendasar, baik dalam komitmen maupun dalam gaya dan cara bekerja, maka badan public yang belum memiliki kemampuan intervensi sosial akan memerlukan pemimpin yang kuat komitmen pribadinya terhadap tercapainya dari strategi holistic tersebut, yakni untuk:
    - 1) menentukan arah nilai organisasi, energi, dan proses menuju strategi.
    - 2) emelihara integritas organisasi yang didukung oleh institutional leadership.
- 2) Keterlibatan publik dan organisasi sosial secara terpadu, memerlukan suatu pedoman untuk memfungsikan supraorganisasi yang bertugas antara lain:
  - a) membangun dan memelihara perspektif menyeluruh

---

<sup>120</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h 78



- b) melaksanakan rekrutmen dan pengembangan kepemimpinan kelembagaan
- c) membuat mekanisme kontrol untuk mengatur saling keterkaitan (interdependensi) antara organisasi formal dan informal melalui sistem manajemen strategis.<sup>121</sup>

Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan jalan yang panjang dan penuh tantangan baik internal maupun eksternal. Hanya dengan komitmen yang kuat dan keberpihakan terhadap rakyat yang tulus serta upaya yang sungguh-sungguh pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, legislatif, para pelaku ekonomi, rakyat, lembaga-lembaga pendidikan serta organisasi-organisasi non pemerintah. Cara kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat dilapis bawah memberikan peluang yang luas untuk menggerakkan dan melancarkan proses belajar masyarakat dalam membangun kehidupannya melalui kerja-kerja konkrit dan melalui uji coba-uji coba dalam skala mikro, kecil dan menengah. Dalam kaitan ini fasilitator pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dan strategis. Fasilitator bukanlah pekerja yang bekerja dengan model “tukang” tetapi mereka adalah aktivis yang bekerja penuh komitmen dan kreativitas serta memiliki semangat tinggi membantu masyarakat belajar membebaskan dirinya dari segala bentuk dominasi yang memiskinkan dan membodohkan.

---

<sup>121</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Pustaka Pelajar: Jakarta. 2010).  
h. 21

Tugas utama fasilitator pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan pembelajaran bagi masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai format ekonomi-politik yang berlangsung secara mapan dibarengi dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdialog sehingga mempunyai kapasitas transaksional dan diharapkan bisa mengambil posisi tawar yang kuat dengan kekuatan lain. Upaya-upaya itu harus disertai dengan menggalang kemampuan untuk membentuk aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan lain agar mampu mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kehidupan mereka.

Menurut Rudi ada tiga dasar di dalam menyusun kegiatan untuk mengembangkan, masyarakat yaitu:

- 1) Strategi empiris rasional yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa manusia adalah kebobohan dan tahyul. Manusia akan mengikuti akan kepentingan dirinya sendiri yang rasional. Manusia akan menerimaperubahan jika perubahan itu dapat diterima dan dibenarkan secara rasional.
- 2) Strategi non reducatif yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa pola tindakan dan perilaku masyarakat didukung oleh norma-norma sosial budaya individu oleh sikap dan norma-norma.
- 3) Strategi kekuatan paksaan yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia akan mengikuti keinginan dari pihak lain yang dipandang pemenuhan kebutuhannya memiliki kekuasaan yang berada pada lebih besar pihak tersebut.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Soetomo.*Op. Cit.* h. 77

Masyarakat yang memiliki tingkat intelektual rendah dan situasi masyarakat yang anomi menurut peran yang lebih besar dari pengusaha untuk melakukan inisiatif dan pengaturan.

- a) Pemberdayaan kelompok masyarakat mengarah pada hal-hal yang mengacu pada: Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam arti bahwa pemberdayaan diutamakan untuk meningkatkan kemampuan, daya saing, dan partisipasi masyarakat.
- b) Pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat, dalam arti semakin memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap masyarakat yang dan komitmen selama ini terpinggirkan dan tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan atas pembangunan suatu daerah.<sup>123</sup>

### **C. Indikator Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

#### ***1. Scanning environtment/ Pengamatan Lingkungan***

Pengamatan lingkungan merupakan akuisisi dan penggunaan informasi mengenai kejadian-kejadian, tren-tren, dan hubungan-hubungan dalam suatu lingkungan eksternal organisasi, di mana merupakan pengetahuan yang akan dapat membantu manajemen dalam merencanakan tindakan-tindakan di masa mendatang.<sup>124</sup> Perusahaan menuju lingkungan masa depan yang tidak pasti, di mana lingkungan usaha menjadi mudah berubah dan para manajer harus sanggup beradaptasi. Perusahaan yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan dan berhasil dengan baik. Keputusan strategik harus diambil untuk kapan dan bagaimana menghadapi perubahan-perubahan.

---

<sup>123</sup> Yudhie Agung Prihatno, *Op. Cit.* h. 27.

<sup>124</sup> Choo, Chun Wei, *The Art of Scanning the Environment*. (Bulletin of the American Society for Information Science. 2009). h.34

Pengamatan lingkungan merupakan suatu proses dasar bagi setiap organisasi untuk memperoleh data atau informasi, dimana informasi tersebut akan digunakan untuk mendefinisikan hal-hal baru yang berkaitan dengan kompetisi dengan pihak luar serta untuk menentukan keputusan penting yang harus diambil bagi organisasi.<sup>125</sup> Secara umum, lingkungan suatu organisasi dapat dibedakan kedalam dua kelompok besar, yaitu lingkungan internal dan eksternal.

Yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah faktor-faktor di dalam organisasi itu sendiri, seperti visi dan misi, tujuan, strategi, perlakuan standar produk dan nilai serta sumber-sumber dan kemampuan yang dimiliki organisasi.<sup>126</sup> Sedangkan Lingkungan eksternal yang kompleks, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap strategi keputusan yang diambil yang bertujuan untuk memenangkan kompetisi. Faktor-faktor eksternal, antara lain faktor ekonomi, politik, social dan teknologi.<sup>127</sup>

Faktor-faktor itu sangat berpengaruh terhadap iklim lingkungan yang sedang berjalan maupun yang akan datang:

- a. Lingkungan eksternal ekonomi
- b. Kompetisi.<sup>128</sup>
- c. Lingkungan eksternal politik.
- d. Tekanan politik.
- e. Lingkungan eksternal sosial
- f. Perubahan sektor sosial.
- g. Lingkungan eksternal teknologi.<sup>129</sup>

---

<sup>125</sup> Onong, *Sistem Informasi manajemen*, (Mandar Maju, Bandung 1989), h. 65

<sup>126</sup> Parker C.S, *Management Information Systems: Strategy and Action*, (Mc. Graw Hill, New York 1989), h. 88

<sup>127</sup> Rockart, J.F, Crescenzi, A.D, *Enganging Top Management in Information Technology*, (Sloan Management Review, 1984), h.70

<sup>128</sup> Onong, *Op.Cit.* h. 98

Sebuah organisasi dikatakan mampu bertahan dalam persaingan jika organisasi tersebut selalu melakukan aktivitas pengamatan dengan baik. dilakukan secara kontinyu atau tidak terjadual.<sup>130</sup> Pengamatan yang tak terjadual biasanya hanya ingin mendapatkan informasi tanpa tujuan tertentu yang terlalu jelas. Sifat pengamatan ini biasanya adalah reaktif, disebabkan adanya krisis, dilakukan oleh para staf yang ada saat itu. Sedangkan pengamatan kontinyu adalah aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan terus-menerus yang berkaitan dengan proses atau metode yang dilakukan sebelumnya. Sifat dari pengamatan ini adalah proaktif, cakupannya luas, merupakan bagian dari perencanaan proses organisasi, dilakukan oleh unit khusus yaitu unit pengamatan dan dilakukan secara kontinyu atau tidak terjadual.<sup>131</sup>

Pengamatan yang tak terjadual biasanya hanya ingin mendapatkan informasi tanpa tujuan tertentu yang terlalu jelas. Sifat pengamatan ini biasanya adalah reaktif, disebabkan adanya krisis, dilakukan oleh para staf yang ada saat itu. Sedangkan pengamatan kontinyu adalah aktifitas yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan terus-menerus yang berkaitan dengan proses atau metode yang dilakukan sebelumnya. Sifat dari pengamatan ini adalah proaktif, cakupannya luas, merupakan

---

<sup>129</sup> . Parker C.S.*Op. Cit.* h. 55

<sup>130</sup> Jasper, James M. 2010.*Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?* Sociology Compass 4/11 (2010): pp.,965-976, 10.1111/j.9020.2010. 000329.x, New York: Graduate Center of the City University of New York.

<sup>131</sup> Onong *Op.Cit.* h. 55

bagian dari perencanaan proses organisasi, dilakukan oleh unit khusus yaitu unit pengamatan.<sup>132</sup>

a) Intensitas Proses Pengamatan

Intensitas proses pengamatan lingkungan eksternal dapat dilihat dari aktivitas organisasi dalam pengamatannya. Intensitas ini sangat bergantung pada relasi antara organisasi dengan lingkungannya relasi antara organisasi dengan lingkungannya dapat diketahui dari tingkat ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya. Semakin besar ketergantungannya, semakin besar pula relasi yang terjalin dan semakin besar pula intensitas pengamatan yang dilakukan.

Sumber-sumber informasi untuk proses pengamatan setiap organisasi memiliki sumber-sumber tertentu yang digunakan untuk menangkap, mengamati dan mengetahui perubahan atau tren teknologi informasi yang sedang digunakan atau terjadi di lingkungan eksternal. Sumber-sumber yang digunakan dapat berupa dokumen, manusia atau kombinasi dari keduanya.<sup>133</sup>

Dokumentasi dapat terdiri dari majalah, jurnal teknologi informasi, jurnal akademis, surat kabar, publikasi telekomunikasi. Sumber dari manusia dapat saja berasal dari produsen/pedagang/penjual produk IT, konsultan, pelanggan, relasi kompetitor dan staf. Sedangkan kombinasi dari

---

<sup>132</sup> Abu Huraerah. *Op.Cit.* h. 101

<sup>133</sup> Stubbard C. *Are Environmental Scanning Units Effective?* (Long Range Planning, 1984), h. 50

keduanya dapat berupa seminar yang berhubungan dengan teknologi informasi, demonstrasi dari produsen/penjual produk IT, pameran teknologi.

Telah dituliskan sebelumnya bahwa semua tingkatan manajerial memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengamatan terhadap lingkungan eksternalnya. Secara khusus, dalam pengamatan eksternal teknologi diperlukan dukungan yang kuat oleh manajemen. Penelitian ini mengoperasionalkan strategi pengamatan dalam berbagai sisi antara lain<sup>134</sup>. dukungan manajemen, reward yang diberikan oleh manajemen, serta kebijakan yang diberikan dalam penggunaan teknologi informasi.

#### b) Identifikasi Variable Lingkungan

Dalam melakukan pengamatan lingkungan, organisasi harus mengetahui berbagai variable dalam lingkungan eksternal. Menurut pearce dan robin bahwa lingkungan eksternal suatu organisasi dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu lingkungan jauh (Remote Environment), lingkungan industry (Industry Environment) dan lingkungan operasional (operasional environment).<sup>135</sup> Sedangkan Wheeten dan Hunger mengkalsifikasikan lingkungan eksternal menjadi dua yaitu lingkungan masyarakat dan lingkungan tugas perusahaan. Lingkungan masyarakat merupakan kekuatan yang tidak secara langsung menyentuh kegiatan

---

<sup>134</sup> Green, G. P., & Dougherty, M. L. (2008). Localizing Linkages for Food and Tourism: Culinary Tourism as a Community Development Strategy. *Community Development*, 39(3), 148–158. <https://doi.org/10.1080/15575330809489674>

<sup>135</sup> *Ibid.* h.88

organisasi dalam jangka pendek, tetapi dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dalam jangka waktu Panjang. Sebagaimana komponen masyarakat meliputi:

1. Kekuatan ekonomi yang mengatur pertukaran material. Uang, energi dan informasi
2. Kekuatan teknologi yang menghasilkan penemuan-penemuan untuk penyelesaian masalah
3. Kekuatan politik hukum, yang menyediakan kekuatan dan memberikan desakan serta perlindungan hokum dan undang-undang
4. Kekuatan sosial budaya yang mengatur nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.<sup>136</sup>

c) Mengidentifikasi Faktor-faktor strategis

Salah satu cara untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengembangan lingkungan eksternal adalah dengan menggunakan matriks prioritas masalah:

1. Mengidentifikasi sejumlah kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi dalam lingkungan.
2. Menilai adanya peluang dari kecenderungan-kecenderungan tersebut yang aktual dari yang rendah ke tinggi
3. Mencoba untuk mengetahui dengan pasti pengaruh yang memungkinkan dari setiap kecenderungan-kecenderungan.<sup>137</sup>

## **2. Formulation Strategy/ Perumusan Strategi**

a. Pengertian Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Mengutip pendapat Martinez yang menyatakan bahwa: pembangunan (pedesaan) yang efektif, bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil "trial and error" tetapi akibat dari perencanaan yang baik, oleh

---

<sup>136</sup> Parker C. *Op. Cit.* h. 132

<sup>137</sup> Choo, Chun Wei. *Op. Cit.* h. 99



karena itu perlu untuk selalu diingat bahwa, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif harus melalui perencanaan program/kegiatan yang baik. Dengan perkataan lain, pemberdayaan masyarakat yang baik harus direncanakan sebaik-baiknya.<sup>138</sup>

Pengertian perencanaan itu sendiri, di dalam teori-teori manajemen antara lain diartikan sebagai: suatu proses pemilihan dan menghubungkan-hubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki.<sup>139</sup>

Selaras dengan pengertian-pengertian di atas, adanya suatu perencanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat akan memberikan "kerangka kerja" (framework) yang dapat dijadikan acuan oleh para fasilitator dan semua pemangku kepentingan atau stakeholder (termasuk warga masyarakatnya) untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan. Di lain pihak, setiap program pemberdayaan masyarakat harus dirancang dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang

---

<sup>138</sup> Terry. G. R. *Principles of Management*. (Homewood: Richard The Erwin. 1960). h. 90

<sup>139</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h. 167

ingin dicapai oleh masyarakat setempat dan (kegiatan) apa yang menurut mereka (fasilitator bersama-sama masyarakat) paling efektif demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Venugopal mendefinisikan perencanaan program sebagai: suatu prosedur kerja bersama-sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah (keadaan-keadaan yang belum memuaskan) dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan penerima manfaat yang ingin dicapai.<sup>140</sup>

Sedang Mueller mengartikan perencanaan program sebagai: upaya sadar yang dirancang atau dirumuskan guna tercapainya tujuan (kebutuhan, keinginan, minat) masyarakat. unmk siapa program tersebut dimjukan,<sup>141</sup>

Beberapa definisi lain, yang hampir serupa, juga disampaikan oleh Martinez, yaitu:

- 1) Perencanaan program merupakan upaya perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan program-program
- 2) Perencanaan program merupakan proses yang berkelanjutan, yang melibatkan semua warga masyarakat, fasilitator, dan para ilmuwan yang memusatkan pengetahuan dan keputusan-keputusan dalam upaya mencapai pembangunan yang mantap. Di dalam perencanaan program, sedikitnya terdapat tiga pertimbangan yang menyangkut: apa, kapan, dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu dilaksanakan.
- 3) Perencanaan program, merupakan pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dikembangkan secara bersama-sama oleh masyarakat, fasilitator. pembina, spesialis, dan para petugas-lapang, pemuda, maupun ibu-ibu rumah-tangga dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain.

---

<sup>140</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h. 167

<sup>141</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h.89

- 4) Perencanaan program merupakan proses berkelanjutan, melalui mana warga masyarakat merumuskan kegiatan-kegiatan yang berupa serangkaian aktivitas yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan masyarakat setempat.
- 5) Perencanaan program merupakan suatu proses berkelanjutan, yang melibatkan seluruh warga masyarakat secara bersama-sama mempertimbangkan upaya-upaya pembangunan masyarakatnya, dengan menggunakan segala sumberdaya yang mungkin dapat dimanfaatkan.<sup>142</sup>

Di samping itu, Lawerence menyatakan bahwa perencanaan program (pemberdayaan masyarakat), menyangkut perumusan tentang:

- 1) proses perancangan program;
- 2) penulisan perencanaan program;
- 3) rencana kegiatan;
- 4) rencana pelaksanaan program (kegiatan);
- 5) rencana evaluasi hasil pelaksanaan program tersebut.<sup>143</sup>

Dari beberapa definisi dan pengertian-pengertian tentang "Perencanaan program" sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan beberapa pokok pikiran yang meliputi:

- 1) Perencanaan program, merupakan suatu proses yang berkelanjutan, artinya, perencanaan program merupakan suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang tidak pernah berhenti sampai tercapainya tujuan (kebutuhan, keinginan, minat) yang dikehendaki.
- 2) Perencanaan program, dirumuskan oleh banyak pihak, artinya dirumuskan oleh fasilitator bersama-sama masyarakat penerima manfaatnya dengan didukung oleh para spesialis, praktisi, dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan upaya-upaya pembangunan masyarakat setempat.
- 3) Perencanaan program, dirumuskan berdasarkan fakta (bukan dugaan) dan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan.
- 4) Perencanaan program, meliputi perumusan tentang keadaan, masalah, tujuan, dan cara (kegiatan) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 5) Perencanaan program, dinyatakan secara tertulis.

---

<sup>142</sup> Martinez. V. A. *Evaluation of the Effectiveness of Training Programme in the Evaluation of Extension Training Programme*. (technical Bulletin No. 68. August.1982). h. 13

<sup>143</sup> Dahama, O.P. *Education and Communication for development*. (New Delhi: Oxford publishing. 1980). h. 56

- 6) Perencanaan program merupakan pernyataan tertulis tentang: keadaan) masalah, tujuan, cara mencapai tujuan, dan rencana evaluasi atas hasil pelaksanaan program yang telah dirumuskan.<sup>144</sup>

#### b. Urgensi Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana telah dikemukakan, setiap upaya perubahan yang berencana memerlukan partisipasi segenap warga masyarakat. Oleh sebab itu, Kelsey dan Heame menekankan pentingnya "pernyataan (tertulis)" yang jelas dan dapat dimengerti oleh setiap warga masyarakat yang diharapkan untuk berpartisipasi. Melalui cara demikian, perubahan yang direncanakan itu diharapkan dapat dijamin kelangsungannya dan selalu memperoleh partisipasi masyarakat.<sup>145</sup>

Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi diperlukannya perencanaan program, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Di dalam kenyataan, terdapat banyak alternatif mengenai apa yang dapat dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Oleh sebab itu, dengan adanya acuan yang sudah "terpilih" akan memudahkan semua pihak untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya.
- 2) Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat (umum). Dengan adanya acuan tertulis, diharapkan dapat mencegah terjadinya salah pengertian (dibanding dengan pernyataan tertulis) dan dapat dikaji ulang (dievaluasi) setiap saat, sejak sebelum, selama, dan sesudah program tersebut dilaksanakan.
- 3) Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul/saran penyempumaan yang "baru". Sepanjang perjalanan pelaksanaan program, seringkali muncul sesuatu yang

---

<sup>144</sup> *Ibid.* h. 59

<sup>145</sup> Kesley, L.D. *Cooperative Extension work* (Ithaca: Comstock Publishing Associate. 1955). h. 71

mendorong perlunya revisi penyempumaan perencanaan program, oleh karena itu, dengan adanya pernyataan tertulis, dapat dikaji seberapa jauh usulan revisi tersebut dapat diterima/ditolak agar tujuan yang diinginkan tetap dapat tercapai, baik dalam arti: jumlah, mutu, dan waktu yang telah ditetapkan.

- 4) Memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi. Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan telah dapat dicapai, diperlukan pedoman yang jelas yang dapat diukur dan dapat dievaluasi setiap saat, oleh siapapun juga, sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan.
- 5) Memberikan pengertian yang jelas terhadap pemilihan tentang kepentingannya dari masalah-masalah insidental (yang dinilai akan menuntut perlunya revisi program) maupun pemantapan dari perubahan-perubahan sementara (jika memang diperlukan revisi terhadap program).
- 6) Mencegah kesalahartian tentang tujuan akhir, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan.
- 7) Memberikan kelangsungan dalam diri personel, selama proses perubahan berlangsung, artinya, setiap personel yang terlibat dalam pelaksanaan dan evaluasi program selalu merasakan perlunya kontinuitas program sampai tercapainya tujuan yang diharapkan.
- 8) Membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumberdaya yang tersedia dan dapat digunakan untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki.
- 9) Menghindarkan pemborosan sumberdaya (tenaga, biaya, dan waktu), dan merangsang efisiensi pada umumnya.
- 10) Menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat.<sup>146</sup>

### c. Ukuran Perencanaan Program yang Baik

Untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan program yang dirumuskan itu telah "baik", berikut ini disampaikan beberapa acuan tentang Pengukurannya, yang mencakup:

---

<sup>146</sup> Kesley, L.D. *Op. Cit.* h. 110

- 1) Analisis Fakta dan Keadaan, Perencanaan program yang baik, harus mengungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan yang "lengkap" yang menyangkut: keadaan Sumberdaya~alam, sumberdaya-manusia, kelembagaan, tersedianya sarana/Prasarana; dan dukungan kebijakan, keadaan sosial, keamanan, dan stabilitas politik. Untuk keperluan tersebut, pengumpulan data dapat dilakukan dengan menghubungi beberapa pihak (seperti: lembaga/aparat pemerintah, tokoh. tokoh masyarakat, organisasi profesi, dll.) dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, pengamatan, pencatatan data sekunder, pengalaman empirik, dll.), agar data yang terkumpul tidak saja cukup lengkap tetapi juga dijamin kebenarannya.
- 2) Pemilihan Masalah Berlandaskan pada Kebutuhan, Hasil analisis fakta dan keadaan, biasanya menghasilkan berbagai masalah (baik masalah yang sudah dirasakan maupun belum dirasakan masyarakat setempat). Sehubungan dengan hal ini, perumusan masalah perlu dipusatkan pada masalah-masalah nyata (real-problems) yang telah dirasakan masyarakat (felt-problems), artinya, perumusan masalah hendaknya dipusatkan pada masalah-masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan-nyata (real needs) masyarakat, yang telah dapat dirasakan (felt needs) oleh mereka.
- 3) Jelas dan Menjamin Kebutuhan, Perencanaan program, harus dengan jelas (dan tegas) sehingga tidak menimbulkan keraguan atau kesalah-pengertian dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, di dalam kenyataannya, seringkali selama proses pelaksanaan dijumpai hal-hal khusus yang menuntut modifikasi perencanaan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal ini, setiap perencanaan harus luwes (memberikan peluang untuk dimodifikasi), sebab jika tidak, program tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan pada gilirannya justru tidak dapat mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan masyarakatnya. Karena itu, selain jelas dan tegas, harus berpandangan jauh ke depan.
- 4) Merumuskan Tujuan dan Pemecahan Masalah yang Menjanjikan Kepuasan, Tujuan yang ingin dicapai, haruslah menjanjikan perbaikan kesejahteraan atau kepuasan masyarakat penerima manfaatnya, jika tidak, program semacam ini tidak mungkin dapat menggerakkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat harus tahu betul tentang manfaat apa yang dapat mereka rasakan setelah tujuan program tersebut tercapai. Seringkali, untuk keperluan ini, tujuan-tujuan dinyatakan secara sederhana, tetapi didramatisasi sehingga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat bagi tercapainya tujuan.
- 5) Menjaga Keseimbangan, Setiap perencanaan program harus mampu mencakup kepentingan Sebagian besar masyarakat, dan

bukannya demi kepentingan sekelompok kecil masyarakat saja. Karena itu, setiap pengambilan keputusan harus ditekankan kepada kebutuhan yang harus diutamakan, yang mencakup kebutuhan orang banyak. Efisiensi, harus diarahkan demi pemerataan kegiatan dan waktu pelaksanaan harus dihindari kegiatan-kegiatan yang terlalu besar menumpuk pada fasilitator atau pada masyarakat penerima manfaatnya.

- 6) Pekerjaan yang Jelas. Perencanaan program, harus merumuskan prosedur dan tujuan serta sasaran kegiatan yang jelas, yang mencakup:
  - a) masyarakat penerima manfaatnya
  - b) tujuan, waktu dan tempatnya
  - c) metode yang akan digunakan
  - d) tugas dan tanggung-jawab masing-masing pihak yang terkait (termasuk tenaga sukarela)
  - e) pembagian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap kelompok personel (fasilitator, masyarakat, dll.)
  - f) ukuran-ukuran yang digunakan untuk evaluasi kegiatannya.
  
- 7) Proses yang Berkelanjutan, Perumusan masalah, pemecahan masalah, dan tindak lanjut (kegiatan yang harus dilakukan) pada tahapan berikutnya, harus dinyatakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Termasuk di dalam hal ini adalah: perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, selaras dengan perubahan kebutuhan dan masalah yang akan dihadapi.
- 8) Merupakan Proses Belajar dan Mengajar, Semua pihak yang terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlu mendapat kesempatan "belajar" dan "mengajar", artinya, masyarakat harus diberi kesempatan untuk belajar mengumpulkan fakta dan keadaan, serta merumuskan sendiri masalah dan cara pemecahan masalahnya. Sebaliknya, fasilitator dan aparat pemerintah yang lain, harus mampu memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai upaya belajar dari pengalaman masyarakat setempat.
- 9) Merupakan Proses Koordinasi, Perumusan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan, harus melibatkan dan mau mendengarkan kepentingan semua pihak di dalam masyarakat. Oleh sebab itu penting adanya koordinasi untuk menggerakkan semua pihak untuk berpartisipasi di dalamnya. Di lain pihak, koordinasi juga sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, tujuan kegiatan tidak akan dapat tercapai seperti yang diharapkan.
- 10) Memberikan Kesempatan Evaluasi Proses dan Hasilnya, Evaluasi, sebenarnya merupakan proses yang berkelanjutan dan melekat (built-in) dalam perencanaan program. Oleh sebab itu, perencanaan program itu sendiri harus memuat dan memberi kesempatan untuk

dapat dilaksanakannya evaluasi, baik evaluasi terhadap proses maupun hasilnya.<sup>147</sup>

Dari kesepuluh pokok ukuran tersebut, secara ringkas dapat dikemukakan beberapa karakteristik perencanaan program yang baik, yang meliputi:

- a) Mengacu kepada kebutuhan masyarakat
- b) Bersifat komprehensif
- c) Luwes
- d) Merupakan proses Pendidikan
- e) Beranjak dari sudut pandang masyarakat
- f) Memerlukan kepemimpinan lokal yang andal
- g) Menggunakan teknik-teknik dan penelitian untuk memperoleh informasi
- h) Mengharapkan partisipasi masyarakat, agar mereka dapat membantu diri mereka sendiri
- i) Menerapkan evaluasi secara berkelanjutan.<sup>148</sup>

d. Filosofi Program Pemberdayaan Masyarakat

Di atas telah dikemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi suatu program yang baik, yang oleh Kelsey dan Hearne disebutnya sebagai prinsip-prinsip Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk memenuhi persyaratan prinsip-prinsip perencanaan ram yang baik seperti itu, setiap penyusunan program perlu memperhatikan filosofi Program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a) Bekerja berdasarkan kebutuhan yang dirasakan (*felt-need*), artinya, program yang akan dirumuskan harus bertolak dari kebutuhan/ kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat, sehingga program itu benar-benar dirasakan sebagai upaya pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang dikehendaki. Sehubungan dengan itu jika ada "kebutuhan nyata" (*real need*)

---

<sup>147</sup> Kesley, L.D. *Op. Cit.* h. 138

<sup>148</sup> Kartsasmita, G. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat.* (makalah disampaikan pada sarasehan Golkartk. 1 Jawa Timur Surabaya, 14 maret 1997)



yang hendak dinyatakan dalam program yang belum dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat, terlebih dahulu harus diupayakan menjadi kebutuhan yang dirasakan (*felt-need*). Sebelum kebutuhan nyata tersebut belum merupakan kebutuhan yang dirasakan, sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam rumusan program, sebab tindakan seperti itu, akan mengganggu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan pemanfaatan hasil yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut.

Di lain pihak, filosofi seperti ini juga mengingatkan kepada para perancang/perumus program pemberdayaan masyarakat untuk tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi harus selalu benar-benar mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan yang sudah atau sedang dirasakan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, biasakanlah mereka untuk bekerja berdasarkan fakta yang ada di lapangan, dan bukan berdasarkan pendapat mereka sendiri.

- b) Bekerja dilandasi oleh anggapan bahwa masyarakat ingin dibebaskan dari penderitaan dan kemiskinan, artinya, setiap program yang akan dilaksanakan haruslah benar-benar diupayakan untuk dapat memperbaiki mutu kehidupan masyarakat, dan bukannya merupakan program yang terlalu banyak menuntut pengorbanan masyarakat demi tercapainya tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh perumus program. Karena itu, setiap perumusan program harus mampu merumuskan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-kehidupan masyarakat penerima manfaat. Tanpa adanya pemahaman seperti ini, niscaya program tersebut tidak akan memperoleh partisipasi masyarakat, bahkan sebaliknya akan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan karena program yang direncanakan itu dinilai akan lebih menyusahkan kehidupan mereka yang sudah lama mengalami penderitaan.

Sehubungan dengan hal itu, semua pihak yang terlibat dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat, harus membekali dirinya dengan pemahaman bahwa masyarakat penerima manfaatnya, seperti halnya masyarakat lain di manapun mereka berada, juga menginginkan suatu perubahan yang menuju ke arah perbaikan mutu hidup atau kesejahteraannya.

Berbicara tentang kesejahteraan, yang dibutuhkan bukanlah sekadar tercukupinya kebutuhan-kebutuhan fisik seperti: pangan, sandanga papan, kesehatan, dll; tetapi mereka juga menghendaki terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sosial yang berupa: keamanan, pengakuan, penghargaan/ tanggapan, dan pengalaman baru.

- c) Harus dianggap bahwa, masyarakat menginginkan "kebebasan baik dalam menentukan/memilih garis hidupnya sendiri dan memutuskan bentuk-bentuk ekonomi, kepercayaan, lembaga politik dan pendidikan yang mereka inginkan demi tercapainya perbaikan mutu kehidupan mereka. Berkenaan dengan itu, setiap perumusan program harus sejauh mungkin mengajak mereka untuk mengemukakan kebutuhankebutuhannya, tujuan-tujuan yang diharapkan, serta alternatif-alternatif pemecahan masalah atau pemilihan kegiatan yang pemecahan masalah yang mereka inginkan. Kalaupun ada perbedaan pendapat antara kehendak masyarakat dengan perumus program, harus diupayakan adanya dialog atau diskusi dengan mereka untuk meyakinkan bahwa alternatif yang dikemukakan oleh perumus program tersebut memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat sasaran. Dialog atau forum diskusi seperti itu harus selalu disediakan untuk menghindari terjadinya pertentangan, hambatan, atau pemborosan energi yang biasanya tersedia sangat langka. Adanya kebebasan atau setidaknya forum diskusi yang bisa mengurangi mutu tujuan yang dicapai, sena seringkali memerlukan banyak energi atau "*social-cost*" yang mahal. Kebebasan atau forum diskusi yang disediakan itu, bukan dalam rangka agar mereka boleh menentukan sendiri pilihan-pilihannya, tetapi disediakan dalam rangka untuk keberhasilan program untuk memecahkan masalah demi tercapainya tujuan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sebab, bagaimanapun, setiap pilihan yang mereka ajukan itu pasti sudah dilandasi oleh pengalaman-pengalaman, serta nilai-nilai sosial budaya yang mereka anut. Di lain pihak, rumusan program yang hanya disusun oleh pihak luar, seringkali belum dilandasi oleh pertimbangan pertimbangan sosial-budaya yang dikuatkan oleh kajian empiris.
- d) Nilai-nilai dalam masyarakat harus dipertimbangkan selayaknya, artinya, rumusan program harus sudah mencakup dan mempertimbangkan nilai-nilai kerjasama, keputusan kelompok, tanggungjawab sosial, kepercayaan, dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. Pertimbangan atas hal-hal seperti itu, di dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat seringkali memiliki arti strategis. Sebab, setiap kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat, harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai adat dan kepercayaan yang mereka bantu; dan di lain pihak, setiap keputusan yang diambil seringkali juga merupakan \_ kelompok yang menuntut kerjasama dan tanggungjawab bersama untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di dalam masyarakatnya sendiri.

Karena itu, pengabaian terhadap hal-hal tersebut seringkali berakibat pada tidak tercapainya tujuan seperti yang diharapkan. Bahkan, pengambilan keputusan seperti itu seringkali merupakan pengalaman buruk yang akan selalu mewamai keputusan masyarakat terhadap setiap upaya pembangunan masyarakat di masa-masa mendatang.

- e) Membantu dirinya sendiri (*self-help*), artinya, secara nyata warga masyarakat harus diarahkan (atau setidaknya dilibatkan) untuk mau dan mampu merencanakan dan melaksanakan sendiri setiap pekerjaan yang diupayakan untuk memecahkan masalah mereka sendiri yang akan dirumuskan dalam program.

Jika masyarakat tidak terlibat atau dilibatkan dalam proses perumusan program, seringkali pelaksanaan programnya juga tidak memperoleh partisipasi aktif dari mereka, sehingga seluruh rangkaian kegiatan sejak perencanaan sampai pelaksanaannya dilaksanakan oleh "orang luar". Dalam keadaan seperti itu, masyarakat penerima manfaat tidak dapat dikaitkan dalam proses membangun. Akibatnya, lambat laun mereka akan kehilangan kepekaan terhadap masalahnya sendiri, tidak memiliki inisiatif dan kreativitas untuk memecahkan masalahnya sendiri, dan akan kehilangan kemandiriannya. Sehingga, proses pembangunan yang direncanakan justru menumbuhkan kondisi ketergantungan.

- f) Masyarakat adalah sumberdaya yang terbesar, artinya, dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat, harus sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia di dalam masyarakat penerima manfaat sendiri, baik modal, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan yang sudah ada.

Dalam hubungan ini, harus selalu diingat bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga, setiap upaya pembangunan harus mampu untuk sebesar-besarnya menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia di masyarakat. Melalui cara seperti ini, proses pembangunan akan memberikan dampak ganda ("*multiplier effect*") bagi tumbuhnya upaya-upaya pembangunan lanjutan di masa-masa mendatang. Sebab, dengan tergarapnya sumberdaya alam, manusia, dan kelembagaan yang ada, akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat untuk berswakarsa dan berswadaya melaksanakan pembangunan di masa mendatang pada cakupan bidang garapan yang semakin luas pula.

Sebaliknya, jika potensi sumberdaya lokal tidak tergarap dan menggantungkan dari luar, pada suatu saat pasti akan kehabisan

kemampuan untuk mendatangkan sumberdaya tersebut, dan karena sumberdaya lokal (terutama sumberdaya manusia dan kelembagaan) tidak pernah tergarap, tidak akan tumbuh inisiatif dan kemampuan baru untuk melaksanakan pembangunan lanjutan, sehingga berhentilah pembangunan di wilayah tersebut.

- g) Program mencakup perubahan sikap, kebiasaan, dan pola pikir, artinya, perumusan program harus mencakup banyak dimensi perilaku manusia. Dalam kaitan ini, harus selalu diingat bahwa setiap pembangunan, pada dasarnya harus mampu membangun manusianya. Pembangunan fisik yang tanpa membangun perilaku manusia, seringkali mengakibatkan tidak termanfaatkannya hasil-hasil pembangunan secara maksimal. Sebaliknya, melalui pembangunan yang berakibat pada perubahan perilaku manusianya, akan menghasilkan manusia-manusia yang berjiwa selalu ingin membangun, serta memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan yang diinginkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, kasus pembangunan jamban keluarga yang tidak diawali dengan menyiapkan manusianya dengan perilaku hidup sehat serta cara pemanfaatan jamban yang benar, akan berakibat pada tidak termanfaatkannya jamban (tersebut; dan di lain pihak, jamban yang ada menjadi tidak terawat seperti sebagaimana mestinya. Sebaliknya, pembangunan yang diawali dengan upaya mengubah perilaku manusianya, akan menghasilkan orang-orang yang penuh inisiatif, kreatif, dinamis, bekerja keras, efisien, mampu memanfaatkan sumberdaya lokal (alam, modal, kelembagaan, dan kemudahan-kemudahan yang ada secara efektif) dan memiliki kemampuan keterampilan yang andal untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri.<sup>149</sup>

e. Lingkup Materi Program Pemberdayaan Masyarakat

Selaras dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, Miller mengemukakan bahwa, lingkup materi program pemberdayaan masyarakat harus mencakup segala aspek kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan serta perbaikan

---

<sup>149</sup> Kesley. *Op. Cit.* h. 202

kesejahteraan masyarakat penerima manfaatnya.<sup>150</sup> Tentang hal ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Optimasi pemanfaatan sumberdaya untuk kegiatan produksi, dengan selalu memperhatikan konservasi sumberdaya alam dan pengelolaan limbah yang ditimbulkannya.
- 2) Efisien sistem produksi, yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi teknis saja, tetapi juga efisiensi ekonomisnya.
- 3) Efisiensi sistem pemasaran produksi.
- 4) Pengelolaan usaha, termasuk pengelolaan ekonomi rumah tangga.
- 5) Pengembangan sumberdaya keluarga (terutama pemuda dan perempuan).
- 6) Pengembangan kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial.
- 7) Pembinaan kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam keluarga, kepemimpinan di lingkungan pekerjaan, maupun kepemimpinan dalam kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial.<sup>151</sup>

Di samping perencanaan program-program yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, tidak kalah pentingnya adalah:

- 1) Program-program yang berkaitan dengan pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
  - a. Pengembangan organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pengembangan sistem kerja pemberdayaan masyarakat.
  - c. Pengembangan proses belajar-mengajar dalam pemberdayaan masyarakat. Pengembangan: metode, materi, dan perlengkapan fasilitator.

---

<sup>150</sup> Chou, Y., Chang, T., Lin, S., & Wu, S. (2017). A Development Strategy for the Leisure Industry in Taiwan. *International Journal of Business and Economic Affairs*, 2(1), 12–17. <https://doi.org/10.24088/ijbea-2017-21003>

<sup>151</sup> Akhyadi, A. S., Ramadani, R. F., & Siregar, H. L. (2020). *Strategy Empowerment Weed Scavengers and Weed Craftsmen Through A "Holistic Development" Approach (Case Study at Saguling Bening Foundation and Bangkit Joint Cooperative in Cihampelas District, West Bandung Regency) Ade*. 9, 1–11.

d. Pengembangan kelembagaan penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat.<sup>152</sup>

2) Program-program yang berkaitan dengan pengembangan karir fasilitator. Pengalaman menunjukkan bahwa, kegiatan pemberdayaan masyarakat pada umumnya hanya terpusat pada upaya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat, serta upaya-upaya perbaikan dan pengembangan sistem pemberdayaan masyarakatnya. Akan tetapi, perhatian terhadap karir fasilitator sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, seringkali dilupakan. Berkaitan dengan itu, beberapa hal yang juga perlu diperhatikan di dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Sistem Pelatihan, baik untuk meningkatkan kualifikasi kemampuan fasilitator maupun dalam kaitannya dengan promosi jabatan/ kenaikan pangkat.
- b. Sistem pengupahan, termasuk anggaran penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seringkali harus dikeluarkan dari kantong fasilitator sendiri.
- c. Sistem kenaikan pangkat dan jaminan hari tuanya.<sup>153</sup>

f. Keberhasilan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Proses pembangunan, adalah proses interaksi semua pihak (pengusaha dan masyarakat) untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat.

---

<sup>152</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h. 62

<sup>153</sup> Bhumkittipich, P., & Ohgaki, H. (2018). Development strategy for sustainable solar home system in the akha upland community of Thailand. *Energies*, 11(6), 1–14. <https://doi.org/10.3390/en11061509>

Karena itu, keberhasilan suatu perencanaan program tidak hanya tergantung pada kualifikasi pemberdayaan masyarakat saja, tetapi juga sangat tergantung kepada kondisi faktor-faktor lain. Tentang hal ini, Pesson mengemukakan adanya lima faktor menonjol yang penting untuk selalu diperhatikan. Kelima faktor itu adalah<sup>154</sup>:

- a) Identifikasi sistem sosial yang bersangkutan, Adanya identifikasi sistem sosial sebelum perencanaan program sangat diperlukan, sebab penerima manfaat pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Melalui identifikasi sistem sosial, akan dapat diketahui beberapa hal yang menyangkut: nilai-nilai sosial budaya masyarakat, struktur kekuasaan, kebiasaan perilaku, dan lain-lain yang sangat menentukan keberhasilan perencanaan program.
- b) Identifikasi mengenai "*key individual*" dalam struktur kekuasaan dari masyarakat penerima manfaat, Setiap sistem sosial, biasanya memiliki struktur kekuasaan tertentu dengan "*key individual*" yang khusus pula. Individu-kunci tersebut, pada umumnya dapat dipegang oleh pemimpin formal, tetapi dalam banyak kasus dapat juga dipegang oleh tokoh-tokoh informal seperti: pemuka agama, tokoh politik, pedagang, petani-kaya, pelepas uang, dsb. Karena itu, penelusuran terhadap individu-kunci sangat diperlukan dalam perencanaan program, sebab mereka dapat mengembangkan opini-

---

<sup>154</sup> Parsons. T. *The social System*. (New York: The Free Press. 1951) h. 44

publik yang sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat demi keberhasilan program yang akan dilaksanakan.

- c) Penerimaan tujuan program oleh *key-individual*, Karena pentingnya peran *key-individual* dalam kehidupan masyarakat, keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh program yang dirancang itu benar-benar telah diterima oleh *key-individual*. Sebelum rumusan program memperoleh pengesahan atau legitimasi dari mereka, keberhasilan program masih sangat diragukan.
- d) Peran serta secara aktif *key-individual* dan individu dalam masyarakat, Keberhasilan pembangunan, pada dasarnya sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, baik dalam pemberian input, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Karena itu, peran serta aktif setiap individu dalam masyarakat penerima manfaat, terutama orang-orang “kunci” akan sangat menentukan keberhasilan perencanaan program.<sup>155</sup>
- e) Dorongan aktif dari setiap individu dalam masyarakat, Adanya peran-serta aktif setiap warga masyarakat, sebenarnya belum cukup jika tidak disertai dengan dorongan-dorongan yang mereka berikan demi keberhasilan program. Sebab, peran serta masyarakat seringkali hanya terbatas kepada pemenuhan harapan yang

---

<sup>155</sup> Harry Hikmat. *Op. Cit.* h. 132



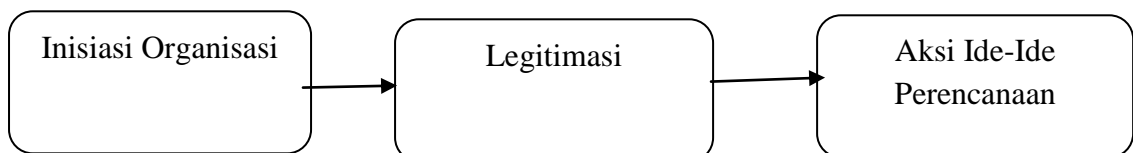
dimintakan kepadanya, tanpa dibarengi oleh sikap atau kehendak yang dilandasi oleh pemahaman dan penghayatan tentang manfaat program yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, dalam setiap perencanaan program perlu untuk selalu ditumbuhkan semangat membangun di kalangan setiap Warga masyarakat, sehingga mereka tidak hanya berpartisipasi karena diminta, tetapi secara aktif mendorong keberhasilan program. program yang direncanakan.<sup>156</sup>

g. Legitimasi Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Perubahan yang terencana, pada hakikatnya merupakan proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan (*action*) sebagai realisasi dari ide-ide yang ditawarkan kepada masyarakat sasaran. Tentang hal ini, Beal dan Bohlen mengemukakan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh setiap ide sebelum menjadi aksi.<sup>157</sup>

**Gambar 5.**

Tahapan ide dan aksi (Perencanaan)



<sup>156</sup> *Ibid.* h. 92

<sup>157</sup> Beal, G. M. *How Farm Accept New Ideas.* (IowaState Collegeand Federal Office. 1955) h. 21

### 1) Pengertian Legitimasi

Legitimasi, secara bahasa dapat diartikan sebagai pengakuan atau pengesahan. Dalam proses perencanaan program, legitimasi diartikan sebagai proses pengesahan atau suatu proses persetujuan atas ide-ide tentang perubahan yang diinginkan, artinya, ide-ide perubahan yang akan dilaksanakan, harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pihak yang memiliki "kekuasaan" sebagai penentu kebijakan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.<sup>158</sup>

Legitimasi, bukanlah sekadar pembubuhan tandatangan atau pemberian "setempel karet" (*rubber stamp*), akan tetapi suatu proses pengkajian yang cermat dan mendalam atas ide perubahan yang disampaikan. Tidak saja tentang kemungkinan dapat diterima, dilaksanakan, tercapainya tujuan yang diinginkan, dan diperolehnya dukungan kepadanya, tanpa dibarengi oleh sikap atau kehendak yang dilandasi oleh pemahaman dan penghayatan tentang manfaat program yang dilaksanakan.<sup>159</sup> Oleh sebab itu, dalam setiap perencanaan program perlu untuk selalu ditumbuhkan semangat membangun di kalangan setiap warga masyarakat, sehingga mereka tidak hanya berpartisipasi karena diminta, tetapi secara aktif mendorong keberhasilan program. program yang direncanakan.

---

<sup>158</sup> *Ibid.* h. 65

<sup>159</sup> Beal, G. M. *Op. Cit.* h. 44

## 2) Makna Legitimasi dalam Pembahasan yang Berencana

Selaras dengan tahapan yang harus dilalui oleh setiap ide yang ditawarkan sebelum dilaksanakan, seperti yang dikemukakan oleh Beal dan Bohlen, tahapan "legitimas" memegang fungsi strategis yang harus diperhatikan oleh semua pihak (khususnya fasilitator) sebelum melaksanakan suatu perubahan.<sup>160</sup> Sebab, jika tidak memperoleh legitimasi, seringkali proses perubahan yang dilaksanakan itu tidak memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakatnya. Bahkan, dapat pula berakibat fatal, berupa ditolakny setiap ide-ide yang akan diajukan pada masa-masa mendatang.<sup>161</sup>

Dengan perkataan lain, legitimasi merupakan tahapan dalam proses perubahan berencana, yang berupa pengakuan/pengesahan ide-ide tentang perubahan, agar ide-ide tersebut memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat jika ide-ide tersebut akan dilaksanakan.

## 3) Pemberi Legitimasi

Pemberi legitimasi adalah semua pihak yang memegang fungsi pengambilan keputusan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan segala macam aspek kehidupan masyarakat banyak.

Pada praktiknya, ternyata pihak pemberi legitimasi tidak terbatas pada pemimpin-pemimpin formal di dalam jalur birokrasi pemerintah, tetapi

---

<sup>160</sup> Beal, G. M. *Op. Cit.* h. 77

<sup>161</sup> *Ibid.* h. 89

juga dipegang oleh para pemimpin informal dari sistem sosial yang bersangkutan. Bahkan, seringkali, kedudukan pemimpin informal (pemuka adat, keagamaan, "key-person" pemasok kebutuhan masyarakat, penyedia kredit, dll) justru lebih "kuat" atau lebih harus diperhitungkan.

#### 4) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Legitimasi

Di atas telah disinggung bahwa, maksud "pencarian" legitimasi adalah untuk memperoleh dukungan pemegang "kekuasaan" atau penentu kebijakan, sebab partisipasi masyarakat dalam upaya merealisasikan ide-ide yang ditawarkan. Karena itu, legitimasi atas ide-ide tersebut terutama akan sangat tergantung kepada:

- 1) Kemampuan "Fasilitator" untuk merancang dan mengorganisasikan perubahan berencana. Hal ini, dapat dilihat dari pengalaman mereka selama menangani kegiatan perubahan berencana yang pernah dilaksanakan
- 2) Kesesuaian ide dengan kebutuhan masyarakat
- 3) Upaya para "fasilitator" untuk meyakinkan para penentu kebijakan tentang arti penting (manfaat, tujuan) yang dapat diharapkan dari pelaksanaan ide-ide yang ditawarkan., Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan fasilitator untuk mengkomunikasikan ide-ide kepada pemegang kekuasaan legitimasi.<sup>162</sup>

---

<sup>162</sup> Totok Mardikanto *Op. Cit.* h. 76

Selaras dengan hal ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan bagi diperolehnya legitimasi atas ide-ide perubahan berencana,<sup>163</sup> yang mencakup:

1. Karakteristik ide yang meliputi:

- a) Kompleksitas ide, yaitu tingkat kompleksitas pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan ide-ide tersebut.
- b) Sumber daya yang diperlukan, baik yang harus disediakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri.
- c) Tingkat keterukuran manfaat, terutama tingkat keterukuran (dapat diukur) secara kuantitatif.
- d) Peluang tercapainya manfaat yang dapat diharapkan, baik peluang secara teknis, ekonomis, maupun kaitannya dengan kebijakan pemerintah (setempat, regional dan nasional).
- e) Tingkat kecepatan diperolehnya manfaat yang diharapkan, baik yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi maupun kelangkaan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan ide-ide yang ditawarkan.
- f) Tingkat pemerataan manfaat, yaitu sampai seberapa jauh pemerataan manfaat kegiatan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (yang sebagian terbesar justru merupakan lapisan bawah yang harus lebih diperhatikan)

---

<sup>163</sup> Sumaryadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Citra Utama: Jakarta. 2004). h. 60

- g) Pautan antar program, atau keterkaitan kegiatan yang direncanakan dengan program-program lainnya, semakin banyak dan erat kaitannya dengan program lain, semakin cepat memperoleh legitimasi.
  - h) Keluwesan program, atau sampai seberapa jauh program tersebut dapat "disesuaikan" dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia; Kemampuan administrasi, baik untuk merancang, melaksanakan maupun memantau dan mengevaluasi kegiatan yang direncanakan
  - i) Luas cakupan administrasi, yaitu seberapa jauh luas cakupan kegiatan yang diusulkan dapat dinikmati oleh masyarakat (baik cakupan geografis maupun cakupan aras sosial-ekonomi).
2. Lingkungan kegiatan yang mempengaruhi<sup>164</sup>, yang meliputi:
- a) faktor-faktor biologis, baik yang dapat/tidak dapat dikendalikan oleh manusia.
  - b) Faktor-faktor ekonomi, yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat sasaran.
  - c) Faktor politis, yang berkaitan dengan kepentingan lokal, regional, dan nasional.
  - d) Faktor sosial, yang berkaitan dengan tingkat keterbukaan atau kekosmopolitanan masyarakat penerima manfaat.

---

<sup>164</sup> *Ibid.* h. 76

- e) Faktor budaya, misalnya yang berkaitan dengan nilai ekonomi anak, atau peran ganda wanita dalam pembangunan.
  - f) Faktor historis, sesuai dengan pengalaman-pengalaman setempat yang telah dialami dalam melaksanakan perubahan berencana di masa lalu.
3. Partisipasi yang diharapkan<sup>165</sup>, yang meliputi:
- a) Dari mana pencetus ide, dari atas ataukah dari bawah.
  - b) Bagaimana cara menggerakkan partisipasi, secara sukarela ataukah secara paksaan.
  - c) Saluran partisipasi yang digunakan.
  - d) Lamanya partisipasi, sekali saja sepanjang pelaksanaan kegiatan, berkali-kali, ataukah justru tems-menerus selama kegiatan itu masih belum "selesai".
  - e) Cakupan partisipasi, mencakup sedikit ataukah banyak kegiatan;
  - f) Berapa banyak penerima manfaat yang akan dicapai dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, serta memanfaatkan hasil perubahan yang direncanakan.

### **3. *Implementation Strategy/ Pelaksanaan Strategi***

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Dalam

---

<sup>165</sup> *Ibid.* h. 80

pengertian lain implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>166</sup>

Guntur setiawan menambahkan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>167</sup> dengan kata lain Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>168</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas

---

<sup>166</sup> Nurdin Usman. *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra*. (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh. 1990). h. 44

<sup>167</sup> Guntur Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2004). h. 77

<sup>168</sup> Nurdin Usman. Op.Cit. h.242



sebagai kegiatan.<sup>169</sup> Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal.

Strategi adalah arah atau jalan yang akan ditempuh organisasi dalam rangka menjalankan misinya untuk menuju pencapaian visi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang maupun damai. Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran. Intinya, strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaing.<sup>170</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan (movement) untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk itu, diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat<sup>171</sup> Strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan.

---

<sup>169</sup> Charles O. Jones. *Pengantar Kebijakan Public* (Jakarta: Rajawali.1991). h. 90

<sup>170</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. (Yogyakarta CV Andi. 2012) h. 34

<sup>171</sup> Aprillia Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 115

Dalam kaitan tersebut, Pemberdayaan masyarakat harus didasari pada asumsi, bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Semua proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga yang memiliki otoritas.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat.<sup>172</sup>

Konsep pemberdayaan berpangkal dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur desa berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama dan saling mengisi. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur dapat meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan tugasnya masing-masing.

---

<sup>172</sup> *Ibid.* h. 134

dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur satu lebih kuat daripada yang lainnya.<sup>173</sup>

Dengan demikian pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat adalah suatu tindakan yang muncul dari implikasi adanya rumusan dan perencanaan strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah di rumuskan demi mencapai kemandirian masyarakat.

Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan tugas sebagai fasilitator untuk memudahkan unsur-unsur yang lain memberdayakan dirinya sendiri. Untuk melaksanakan tugasnya dalam pemberdayaan masyarakat desa, para pekerja atau fasilitator harus profesional, memiliki kemampuan dan keterampilan terkait. Setiap unsur harus kompeten, mempunyai kemampuan dalam memahami teori dan bertindak praktis, serta dapat membuat refleksi.

#### **4. *Evaluation Strategy/Evaluasi* atau *Pengawasan Strategi***

Kata "evaluasi", dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai padanan istilah dari "penilaian", yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai sesuatu obyek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati.<sup>174</sup> Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika, tanpa kita sadari, setiap saat kita telah melakukan evaluasi, baik di rumah (sejak sebelum mengambil keputusan untuk bangun tidur, kapan harus mandi, makan, pakaian apa yang akan dipakai, dll.), di perjalanan (sewaktu memilih kendaraan yang akan kita tumpangi, tatkala melihat gadis yang

---

<sup>173</sup> *Ibid.* h.92

<sup>174</sup> Harry Hikmatt. *Op. Cit* h. 77

berpapasan dengan kita, dll.) atau di tempat pekerjaan (untuk menilai apa yang harus kita lakukan, bagaimana harus bersikap dengan orang yang sedang kita hadapi, ataupun menilai kegiatan yang dilakukan orang lain atau yang kita kerjakan sendiri).<sup>175</sup>

Dari contoh yang sederhana tersebut, secara garis besar pokok-pokok dalam pengertian evaluasi diantaranya:

- a. Evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau sesuatu obyek.
- b. Membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui dan atau miliki.
- c. Melakukan penilaian, atas segala sesuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan.<sup>176</sup>

Dengan demikian, evaluasi strategi pemberdayaan meliputi kegiatan berikut:

- a. observasi (pengamatan)
- b. membanding-bandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu
- c. pengambilan keputusan atau penilaian atas obyek yang diamati.<sup>177</sup>

Sehingga dalam pengertian lain evaluasi adalah kegiatan sistematis yang dimaksudkan untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap sesuatu obyek berdasarkan pedoman yang telah ada. Dengan kata lain dapat

---

<sup>175</sup> Amadi, E. C. (2018). *Assessment of Non-Formal Education in Obio / Akpor Local Government Area of Rivers State: A Strategy for Community Development*. March

<sup>176</sup> Totok Mardikanto *Op. Cit.*, h. 265

<sup>177</sup> Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT. Refika Aditama. 2006). H. 72

ditarik kesimpulan bahwa pengertian evaluasi strategi sebagai kegiatan terencana dan sistematis serta bersifat obyektif sebagai berikut:

- a. Pengamatan untuk pengumpulan data atau fakta, artinya kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan data dan fakta dan bukan praduga atau intuisi orang yang melakukan evaluasi
- b. Berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan, artinya bahwa kegiatan ini harus berlandaskan atas konsep atau pedoman yang telah disusun
- c. Pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>178</sup>

a. Macam-Macam Evaluasi

1) Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap program atau kegiatan yang telah dirumuskan, sebelum program atau kegiatan itu sendiri dilaksanakan. Sedangkan evaluasi sumatif merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan.<sup>179</sup>

2) On-going evaluation dan Ex-post evaluation

On-going evaluation. adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat program atau kegiatan itu masih/sedang dilaksanakan, yang dimaksudkan untuk mengetahui ada/tidaknya penyimpangan pelaksanaan kegiatan dibanding program atau rencana yang telah ditetapkan, sekaligus (jika ditemukan penyimpangan) segera merumuskan langkah-langkah pengantisipasiannya.<sup>180</sup>

---

<sup>178</sup> Development, E. (2004). *Education Development and Leadership in Higher Education*. <https://doi.org/10.4324/9780203463734>

<sup>179</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h. 267

<sup>180</sup> Aprilia Theresia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Bandung: Alfabeta.2014). h. 267

### 3) Evaluasi Intern dan Evaluasi Ekstern

Ditinjau dari pelaksana kegiatan evaluasi, atau siapa yang melakukan evaluasi, kegiatan evaluasi, juga dapat dibedakan menjadi evaluasi intern dan evaluasi ekstern.<sup>181</sup>

Pada evaluasi intern, pengambil inisiatif diadakannya evaluasi maupun pelaksana kegiatan evaluasi adalah orang-orang atau aparat yang terlibat langsung dengan program yang bersangkutan (administrator program, penanggungjawab program, pelaksana program) atau orang-orang atau aparat di dalam organisasi pemilik/pelaksana program, yang memang memiliki fungsi atau tugas untuk melakukan evaluasi dalam organisasi (seperti: aparat Inspektorat, aparat biro/ bagian pengawasan, aparat biro/bagian pemantauan dan evaluasi).

Sedang evaluasi ekstern, adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak luar (di luar organisasi pemilik/pelaksana program), meskipun inisiatif dilakukannya evaluasi dapat muncul dari kalangan orang luar, atau justru diminta oleh organisasi pemilik/pelaksana program yang bersangkutan. Tergantung kepentingannya, evaluasi intern maupun evaluasi ekstern dapat melakukan evaluasi formatif, evaluasi sumatif on-going evaluation, maupun ex-post evaluation.<sup>182</sup>

### 4) Evaluasi Teknis dan Evaluasi Ekonomi

Dilihat dari aspek kegiatan yang dievaluasi, dikenal adanya evaluasi teknis (flsik) dan evaluasi ekonomi (keuangan). Evaluasi teknis (fisik),

---

<sup>181</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h.268

<sup>182</sup> Aprilia Theresia. *Op. Cit.* h. 203

adalah kegiatan evaluasi yang penerima manfaat dan ukurannya menggunakan ukuran-ukuran teknis (fisik).

#### 5) Evaluasi Program, Pemantauan, dan Evaluasi Dampak Program

*Evaluasi program*, dapat diartikan sebagai evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draft/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi seperti ini, selain bertujuan untuk mengkaji kembali keterandalan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman/patokan yang diberikan. Selain itu, juga dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang mereka rumuskan itu, jika program tersebut kelak akan dilaksanakan.

Adapun pentingnya evaluasi program dilakukan kepada siapa penekanannya adalah sebagai berikut:

- 1) Siapa (kelompok) penerima manfaat program, dimana lokasinya, dan bagaimana spesifikasi (kekhususan) kelompok penerima manfaat program tersebut.
- 2) Apa metode yang terbaik yang akan diterapkan, demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
- 3) Apakah program tersebut benar-benar konsisten dengan tujuan yang diinginkan.
- 4) Seberapa jauh peluang keberhasilan program yang akan dilaksanakan.<sup>183</sup>

*Pemantauan program*, Diartikan sebagai proses pengumpulan informasi (data dan fakta) dan pengambilan keputusan-keputusan yang terjadi selama proses pelaksanaan program, dengan maksud untuk

---

<sup>183</sup> Totok Mardikanto, *Op. Cit.* h. 274

menghindari terjadinya keadaan-keadaan kritis yang akan mengganggu pelaksanaan program, sehingga program tersebut tetap dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

*Evaluasi dampak program*, Sebagian besar kegiatan evaluasi umumnya diarahkan untuk mengevaluasi tujuan program atau dampak kegiatan yang telah dihasilkan oleh pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kegiatan seperti ini, hanya dapat dilakukan jika tujuan program benar-benar dirumuskan secara jelas dan telah disediakan cara-cara pengukurannya, baik yang menyangkut perubahan perilaku, perilaku, atau ukuran-ukuran yang lain seperti: tingkat produktivitas, tingkat kelahiran/kematian, dll.

#### 6) Evaluasi proses dan Evaluasi hasil

Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh proses kegiatan yang telah dilaksanakan itu sesuai (dalam arti kuantitatif maupun kualitatif) dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana telah dirumuskan di dalam programnya.

Sedangkan Evaluasi' hasil, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi tentang seberapa jauh tujuan-tujuan yang direncanakan telah dapat dicapai, baik dalam pengertian kuantitatif maupun kualitatif.<sup>184</sup>

#### b. Tujuan Evaluasi

pada dasarnya tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari

---

<sup>184</sup> Totok Mardikanto, *Op. Cit.* h. 278



pedoman yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan (diskrepansi) antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya dapat segera diambil langkah-langkah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.

c. Kegunaan Evaluasi

1) Kegunaan operasional<sup>185</sup>, yakni:

melalui evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentitikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan (pemberdayaan) yang dilakukan.

a) melalui evaluasi, dapat kita lakukan perubahan-perubahan, modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan yang dilaksanakan

b) melalui evaluasi, akan dapat dikembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelaporan kegiatan

2) Kegunaan analitis<sup>186</sup>, yakni:

a) Untuk mengembangkan dan mempertajam tujuan program dan Pemmusannya.

---

<sup>185</sup> . Soediyanto. *Op. Cit.* h. 280

<sup>186</sup> Bagus Sanjaya, R. (2018). *Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 05, 91–91. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p05>

- b) Untuk menguji asumsi-asumsi yang digunakan, dan untuk lebih menegaskannya lagi secara eksplisit.
  - c) Untuk membantu dalam mengkaji ulang proses kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang dikehendaki.
- 3) Kegunaan kebijakan<sup>187</sup>, yakni:
- a) Berlandaskan hasil evaluasi, dapat dimmuskan kembali, strategi pembangunan, pendekatan yang digunakan, setta asumsi-asumsi dan hipotesis-hipotesis yang akan diuji.
  - b) Untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar kegiatan pembangunan, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan efesiensi kegiatan di masa-masa mendatang

Dalam kegiatan pemberdayaan, kegunaan evaluasi meliputi:

1. Kegunaan bagi kegiatan pemberdayaan, yakni:
  - a. Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan kegiatan telah dicapai.
  - b. Untuk mencari bukti, apakah seluruh kegiatan telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah semua perubahan~perubahan yang terjadi memang sesuai dengan penerima manfaat yang diinginkan.
  - c. Untuk mengetahui segala masalah yang muncul/ dijumpai, yang berkaitan dengan tujuan yang diinginkan.
  - d. Untuk mengukur efektivitas dan efesiensi sistem kerja dan metode-metode pemberdayaan yang telah dilaksanakan.
  - e. Untuk menarik simpati para aparat dan warga masyarakat, bahwa program yang dilaksanakan itu memang memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh untuk selanjutnya, dengan adanya simpati mereka itu diharapkan lebih meningkatkan aktivitas dan partisipasi mereka dalam kegiatan pemberdayaan di masa-masa mendatang.<sup>188</sup>

---

<sup>187</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h 283

<sup>188</sup> Soetomo. *Op. Cit.* h 186

2. Kegunaan bagi aparat pemberdayaan, yakni:
  - a) Adanya kegiatan evaluasi, fasilitator merasa diperhatikan dan tidak dilupakan, sehingga memberikan kepuasan psikologis yang akan mampu mendorong aktivitas pemberdayaannya di masa mendatang.
  - b) Melalui evaluasi, seringkali juga digunakan untuk melakukan penilaian terhadap aktivitas atau mutu kegiatan fasilitator itu sendiri, yang sangat penting artinya. Karena melalui evaluasi biasanya juga akan menentukan masa depan/ promosi bagi pengembangan karier yang bersangkutan.
  - c) Dengan adanya kegiatan evaluasi, setiap fasilitator akan selalu mawas diri, dan selalu berusaha agar kegiatannya dapat dinilai baik,<sup>189</sup>
- 4) Kegunaan bagi pelaksana evaluasi, yakni:
  - a) Kebiasaan untuk mengemukakan pendapat berdasarkan data atau fakta dan bukan didasarkan pada asumsi, praduga, atau intuisi semata.
  - b) Kebiasaan bekerja sistematis, sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan
  - c) Memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan dan mengembangkan.<sup>190</sup>

---

<sup>189</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h 190

#### d. Landasan Evaluasi

Evaluasi sebagai suatu kegiatan, sebenarnya merupakan proses untuk mengetahui atau memahami dan memberikan penilaian terhadap suatu keadaan tertentu, melalui kegiatan pengumpulan data atau fakta dan membandingkannya dengan ukuran serta cara pengukuran tertentu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan evaluasi harus selalu memperhatikan tiga landasan evaluasi yang mencakup:

- 1) Evaluasi dilandasi oleh keinginan untuk mengetahui sesuatu, sehingga harus Selalu berusaha untuk menghimpunkan data/fakta sebanyak-banyaknya baik yang berupa data primer maupun data sekunder, data kuantitatif maupun data kualitatif dan Tidak mudah percaya kepada salah satu sumber saja, melainkan berusaha untuk mengumpulkan data dari semua pihak yang dinilai dapat memberikan data yang lengkap dan dapat dipercaya, baik karena keparannya maupun keterlibatannya (secara langsung maupun tak langsung) dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan.
- 2) Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, sehingga dalam pengambilan keputusan tentang penilaian harus selalu dilandasi oleh suatu kesimpulankesimpulan yang diperoleh dari analisis

---

<sup>190</sup> Bachtiar, A., Windia, W., & Astiti, W. (2016). *Persepsi Masyarakat dan Strategi Pengembangan Agrowisata Salak di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali*. *JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS (Journal of Agribusiness Management)*, 4(1), 26–36.

data atau fakta yang berhasil dikumpulkan. Kegiatan evaluasi, sama sekali tidak boleh berdasarkan pada opini atau keinginan-keinginan pribadi yang tidak didukung oleh data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- 3) Obyektif; atau dapat diterima oleh semua pihak dengan penuh kepercayaan dan keyakjannya dan bukan karena adanya suatu keinginan-keinginan (interest) tertentu atau disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.<sup>191</sup>

Dengan demikian, pengambilan keputusan tentang penilaian harus mengacu pada Pedoman pengukuran yang sudah ditetapkan, Menggunakan alat analisis yang tepat dan Dapat dipercaya, dalam arti tidak memasukkan pendapat pribadi, dan didukung oleh data, fakta, teori, atau hasil-hasil kajian atau pengalaman empirik.

#### e. Prinsip-prinsip Evaluasi

kegiatan evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi yang terdiri atas:

- 1) Evaluasi harus efektif dan efisien.
- 2) Kegiatan evaluasi harus merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan program
- 3) Setiap evaluasi harus obyektif, Menggunakan pedoman, Menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dan teliti, menggunakan alat ukur yang tepat (valid, sah) dan dapat dipercaya (teliti, reliable).
- 4) Setiap evaluasi, harus menggunakan alat-ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan evaluasi yang berbeda pula.
- 5) Evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk data kuantitatif, agar dengan jelas dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan

---

<sup>191</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h. 287

tingkat penyimpangan pelaksanaannya, Uraian kualitatif, agar dapat diketahui faktor-faktor: penentu keberhasilan, penyebab kegagalan dan faktor penunjang serta penghambat keberhasilan tujuan program yang direncanakan,<sup>192</sup>

f. Indikator Keberdayaan Masyarakat

Agar para fasilitator mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga ketika pendampingan sosial diberikan, Segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari penerima manfaat perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan:

- 1) Kebebasan mobilitas
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi
- 6) Kesadaran hukum dan politik
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi<sup>193</sup>

Beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup:

- 1) Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan.
- 2) Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan
- 3) Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk mempetoleh penimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan

---

<sup>192</sup> J. David hunger. *Manajemen Strategics*. (Penerbit Andi: Yogyakarta. 2003). h. 300

<sup>193</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h. 290

- 4) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program pengendalian
- 5) Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan
- 6) Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah
- 7) Meningkatkan kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
- 8) Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit malaria
- 9) Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan
- 10) Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.<sup>194</sup>

---

<sup>194</sup> Totok Mardikanto. *Op. Cit.* h. 290